

TAHUN
2025

LAPORAN KINERJA



BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Umum Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Umum Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS SUMBER DAYA AIR & BINA KONTRUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sumber Daya Air & Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sumber Daya Air & Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA RSUD ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA RSJ PROF HB SAANIN PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja RSJ Prof HB Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen RSJ Prof HB Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA RSUD M. NATSIR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja RSUD M. Natsir Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen RSUD M. Natsir Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu organisasi. Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Oleh karena itu, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai Unsur Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan laporan kinerja Badan Penghubung tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	a. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani. b. Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100.00%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1				100.00%
2	Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan.	a. Jumlah Aktifitas Koordinasi Dengan Perantau yang dilaksanakan. b. Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	22 kali	19 kali	86.36%
			4 kali	2 kali	50%

	Rata-Rata Capaian Sasaran 2				68.18%
3	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	a. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	8 kali	66.67%
		b. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	18 kali	14 kali	77.78%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3				72.22%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73.53)	BB (70.05)	95.27%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 4				95.27%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (79.00)	Baik 87.25	110.44%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 5				110.44%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1,2,3,4 & 5				89.22%

Berdasarkan Tabel Capaian Sasaran tersebut diatas, disimpulkan bahwa diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja 5 (lima) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan telah mencapai kategori **“Sangat Tinggi”**, 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai kategori **“Tinggi”**, satu indikator kinerja yang mencapai kategori **“Sedang”** dan 1 (satu) kategori dengan kategori **“Sangat Rendah”**. Secara rata-rata Capaian Sasaran Strategis Badan Penghubung pada tahun 2025 yaitu **89.22%** dengan kategori **“Tinggi”**.

Tahun 2025 Badan Penghubung telah melaksanakan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya serta mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan acara dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategisnya, walaupun terdapat Efisiensi Anggaran terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 dan PMK No. 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja serta kondisi Bencana Alam yang terjadi pada akhir tahun Anggaran sehingga menjadi pertimbangan untuk pembatalan beberapa Kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian target indikator kinerja.

Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menggunakan informasi pada Laporan ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan serta penetapan target kinerja yang *achievable*, realistis dan menantang;
- c. Peningkatan kapabilitas ASN Badan Penghubung melalui kegiatan bimbingan teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan pelatihan keprotokolan bagi

protokol dan sopir sehingga dapat meningkatkan kapabilitas personel pelayanan pimpinan daerah;

- d. Koordinasi yang baik dengan Kementrian dan Lembaga di Pemerintah Pusat dalam hal pengurusan kepentingan daerah dan Surat Keputusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat.
- e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
- f. Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah, Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta serta memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- g. Menguatkan komitmen dari semua ASN dan pegawai Badan Penghubung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima sebagai Duta Sumatera Barat di Jakarta.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Organisasi	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung.....	2
C. Struktur Organisasi Badan Penghubung.....	5
D. Sumber Daya Manusia.....	7
1.2. Aspek Strategis Organisasi	10
1.3. Permasalahan Utama (Strategis Issued) Yang seang dihadapi	12
Organisasi	14
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	15
2.1. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	27
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	19
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	19
3.3. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.4. Realisasi Anggaran.....	107
BAB IV PENUTUP	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan (kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan pemerintahan yaitu wajib dan pilihan dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta 18 Tahun 2016 bahwa Badan Penghubung Daerah adalah Jabatan Administrator termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setingkat eselon III yang tidak dilakukan pemetaan, skoring dan besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi yang berkedudukan di Ibukota negara (Pusat Pemerintahan). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 24 ayat (7) menyatakan bahwa ***"Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara"***. Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : ***"Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga) Subbidang"***. Badan Penghubung Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas dibentuk untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, sehingga dapat berperan dalam membantu untuk memudahkan komunikasi serta administrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Selanjutnya diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 2 huruf e bahwa Badan Penghubung adalah salah satu Perangkat Daerah yaitu Badan Daerah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 19 Jakarta Timur – DKI Jakarta (Gedung Hotel Balairung Lantai 4). Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menempati gedung/kantor tersebut dengan sistem sewa kepada pihak PT. Balairung Citrajaya Sumbar selaku pengelola gedung. Luas gedung/kantor yang ditempati adalah sekitar 416 m² dengan sistem sewa per tahun. Jika dilihat dari letak/lokasi kantor berada pada posisi strategis, dimana hal ini menjadi keuntungan dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak lainnya (*stakeholders*).

- **Tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat**

Tugas pokok Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menurut Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah **“Membantu Gubernur Untuk Menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat”**.

- **Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat memiliki sejumlah fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah :

1. Perumusan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
2. Pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pada tanggal 29 Desember 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat maka Unit Pelaksana Teknis Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah diintegrasikan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut maka per Tahun 2017 Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah yang awalnya merupakan UPTD dari Dinas Pariwisata bergabung dengan Badan Penghubung.

Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari 4 Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- f. pelaksanaan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
- h. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;

- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan

Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan program rencana kerja dan penyusunan bahan mekanisme operasional keprotokolan dan pelayanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kunjungan bagi unsur pimpinan daerah ke pusat dan provinsi lainnya;
- c. pelaksanaan pelayanan kehubungan masyarakatan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam pelaksanaan tugas di luar Provinsi Sumatera Barat;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- e. pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis hubungan antar lembaga pemerintah dan swasta;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peran serta lembaga/non lembaga, masyarakat, dan swasta dalam menunjang pembangunan;

- c. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi hubungan dengan lembaga/pemerintah luar negeri dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan;
- d. pelaksanaan harmonisasi dalam penguatan peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Promosi Daerah

Seksi Promosi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Promosi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan bahan kebijakan Seksi Promosi Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam bidang promosi daerah di Jakarta dan di luar Sumatera Barat;
- c. pelaksanaan pengelolaan Anjungan Sumatera Barat pada Taman Mini Indonesia Indah;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sebagai bahan promosi daerah pada tingkat nasional dan internasional;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG

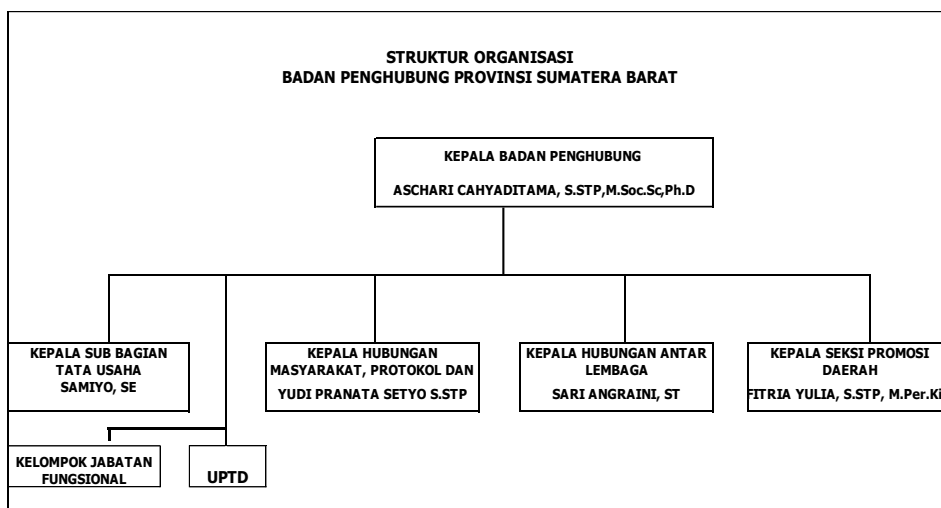
Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur mengenai Badan Penghubung disebutkan bahwa “Kedudukan Badan Penghubung merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat”. Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Kepala Badan** selaku pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung
- b. **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- c. **Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan.
- d. **Seksi Hubungan Antar Lembaga**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- e. **Seksi Promosi Daerah**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Promosi Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat disajikan sebagaimana di bawah ini:

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian/Seksi pada tahun 2023 berjumlah 45 orang

Aparatur Sipil Negara. Jika dilihat dari jenis kelamin, komposisi pegawai tersebut terdiri dari 21 orang laki-laki (47.00%) dan 24 orang perempuan (53.00%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang jauh antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang berarti dapat mendukung secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	19 orang	47.50 %
2.	Perempuan	21 orang	52.50 %
	Total	40 orang	

Sumber:Daftar Pegawai Badan Penghubung 2025

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan formal, komposisi pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Doktoral (Strata 3)	1 orang	2%
2.	Pasca Sarjana (Strata 2)	4 orang	9%
3.	Sarjana (Strata I)	23 orang	58%
4.	Sarjana Muda (D-III)	1 orang	2%
5.	SLTA	8 orang	18%
6.	SLTP	5 orang	11%
	<i>Jumlah</i>	40 orang	100%

Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2025

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang terdiri dari 58% pegawai sudah berpendidikan minimal sarjana, 2% Diploma, namun sebanyak 18% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sementara sisanya 11 % tamatan SLTP yang harus mengikuti pendidikan non formal dan ujian penyetaraan ijazah untuk bisa naik pangkat ke golongan ruang selanjutnya. Sehingga dianggap penting adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional.

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah:

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai golongan IV	2 orang	5 %
2	Pegawai golongan III	35 orang	87.50 %
3	Pegawai golongan II	3 orang	7.5 %
	<i>Jumlah</i>	40 orang	100%

Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2025

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 87.50% pegawai Badan Penghubung adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun.

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Sub Bagian Tahun 2025

No.	Sub Bagian/Seksi	Jumlah	Persentase
1.	Sub Bagian Tata Usaha	18 orang	45%
2.	Seksi Promosi Daerah	8 orang	20%
3.	Seksi Hubungan Antar Lembaga	6 orang	15%
4.	Seksi Humas Protokol dan Pelayanan	8 orang	20%
	Jumlah	40 orang	100%

Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2025

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 45 % pegawai berada di Sub Bagian Tata Usaha, sedangkan sebanyak 20 % jumlah pegawai yang ditempatkan pada Seksi Promosi Daerah yang mencakup juga Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu di Seksi Humas Protokol dan Pelayanan terdapat 8 orang pegawai atau sebanyak 20 %, dan penambahan pegawai dari tenaga *outsourcing* sebanyak 19 orang pada seksi ini untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan tamu dan Pimpinan Daerah serta peliputan pada Badan Penghubung.

Selain pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Daerah, pada Badan Penghubung juga dipekerjakan pegawai dengan status *outsourcing* yang dibutuhkan dan ditempatkan pada masing-masing Sub Bagian Tata Usaha (tenaga kebersihan dan satpam pada

Asrama Mahasiswa di Bogor), tenaga supir dan administrasi pada Seksi Humas Protokol dan Pelayanan serta tenaga keamanan dan kebersihan di Seksi Promosi Daerah (penempatan pada Anjungan Sumatera Barat TMII). Hal ini dikarenakan masih banyak dibutuhkan tenaga tambahan yang tidak dapat dipenuhi dari pegawai ASN. Rincian dari masing-masing tugas tenaga kontrak (*outsourcing*) tersebut adalah :

Tabel 1.5.
Rincian dan Jumlah Tenaga Outsourcing Tahun 2025

No.	Sub Bagian/Seksi	Jumlah
1.	Tenaga Penunjang Administrasi	6 orang
2.	Sopir	14 orang
3.	Tenaga Keamanan	7 orang
4.	Tenaga Kebersihan	8 orang
	Jumlah	35 orang

Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2025

Untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran Pendapatan sebesar **Rp 52.000.000,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp71.650.000,- (137.79%)** dan Belanja Daerah sebesar **Rp 16.129.911.165,01,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 15.870.101.865,01** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 259.809.300,-**. Adapun realisasi Belanja pada akhir Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Operasi sebesar Rp. **14.685.356.180 (92.53%)** sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp **5.317.500,- (2.05%)**. Jumlah total realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 14.690.673.680** atau mencapai **91.08 %** dari total Anggaran Belanja.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan aktiva bergerak seperti kendaraan dinas, barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi cukup baik, dan sampai dengan Tahun 2025 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan melakukan pembelian/ pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penghubung merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur terkait koordinasi pelaksanaan urusan

pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Badan Penghubung juga mempertimbangkan permasalahan dan isu strategi yang ada serta berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Aspek-aspek strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat dalam beberapa poin berikut: Letak/ Posisi Di jalur strategis, Jl. Matraman Raya No. 19, akses yang cepat ke Kantor Kementerian/ Lembaga. Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari Sarana dan Prasarana Kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, dan peralatan rumah tangga yang cukup memadai dalam melayani pejabat daerah yang bertugas di Jakarta dan pelaksanaan tupoksi lainnya. Promosi potensi daerah dan Publikasi melalui Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah, website <https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/>, media cetak dan elektronik serta media publikasi kegiatan pimpinan daerah di Sumatera Barat. Dilihat dari lokasi/ letak Badan berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

Aspek-aspek strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut:

Tabel 1. 6 Aspek Strategis Badan Penghubung

No	Indikator	Aspek Strategis	Keterangan
1	Letak/ Posisi	Di jalur strategis, Jl. Matraman Raya No. 19, akses yang cepat ke Badan Kementerian/ Lembaga Pusat lainnya	Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari
2	Sarana dan Prasarana	Kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan Badan, Gedung bangunan kantor beserta Rumah Gadang di Anjungan Sumatera Barat, Gedung Asrama di Bogor dan Yogya serta peralatan rumah tangga yang cukup memadai	Dalam melayani pejabat daerah yang bertugas di Jakarta dan pelaksanaan Tupoksi lainnya, serta <i>stakeholder</i> Badan Penghubung lainnya.
3	Promosi dan Publikasi	Melalui media cetak dan elektronik serta website Badan Penghubung https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/ serta https://www.sumbarprov.go.id	Anjungan Sumatera Barat yang merupakan "Show Window" budaya Minangkabau, melalui kerjasama dengan pihak media cetak lain selain itu promosi dan publikasi kegiatan pimpinan daerah melalui website Badan Penghubung

4	Pelaksanaan tugas pemerintahan	Lokasi kementerian/ lembaga yang berpusat di Jakarta memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas	Percepatan dalam proses administrasi urusan pemerintahan daerah
5	Sosial Budaya	Komunikasi yang intens dengan Bakor/ Paguyuban Perantau Minang yang ada/ berpusat di Jakarta	Selalu ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya serta keagamaan dengan perantau minang

Gambaran Aspek Strategis Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Dukungan Sumber Daya yang memadai (sumber daya manusia, sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan dengan lokasi strategis di pusat kota dengan perlengkapan dan peralatan Badan yang cukup memadai, anggaran dan sebagainya);
- c. Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dan dipromosikan kepada masyarakat serta investor baik dalam maupun luar negeri;
- d. Adanya Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah yang menjadi sarana promosi budaya Minangkabau dan edukasi siswa sekolah. Tak jarang pula, Pemerintah Provinsi mengadakan kegiatan paguyuban dan upacara adat yang dikunjungi oleh komunitas masyarakat lokal. Beberapa Anjungan Daerah juga menjual kuliner daerahnya masing-masing yang jarang ditemukan di tempat lain.
- e. Website Badan Penghubung yang merupakan jendela atau pusat informasi terpadu tentang potensi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta media publikasi kegiatan pimpinan daerah.
- f. Kondisi letak yang strategis memudahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, baik dengan Pemerintah Pusat, Kementrian dan Lembaga yang ada di Jakarta maupun dengan perantau Minang di Indonesia;
- g. Badan Penghubung memiliki relasi koordinasi yang baik dengan Kementerian Luar Negeri karena telah terdaftar sebagai Admin Aepsilon Provinsi Sumatera Barat (Pengurusan Passport Dinas) dan pihak penghubung penanggungjawab pengambilan dokumen/surat- surat dinas di ULA (Unit Layanan Administrasi) di OTDA Kementerian Dalam Negeri.
- h. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah;

- i. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi;
- j. Sumber Daya Perantau Minang yang cukup besar.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada pihak yang berkepentingan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik secara internal maupun dari faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

a. **Perlunya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yang Lebih Respresentatif**

Struktur organisasi Badan penghubung yang saat ini dipimpin oleh Kepala Badan (Eselon III), yang membawahi 1 Kepala Sub bagian dan 3 seksi (eselon IV) yaitu Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan dan Seksi Promosi Daerah, seiring dengan kompleksitas dan tantangan ke depan sudah tidak respresentatif sehingga perlunya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, serta semakin luasnya hubungan dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional sudah selayaknya Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dikembangkan menjadi organisasi yang lebih rerepresentatif dan koordinatif.

b. **Diperlukan Sarana dan Prasarana yang Baik Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor**

Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang baik.

c. **Perlu Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan Kemampuan Kognitif dan Kemampuan Spiritual yang Seimbang**

Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan pembinaan kepada SDM Sumatera Barat melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual guna meningkatkan kualitas SDM Sumatera Barat. Melalui pelatihan kemampuan kognitif dan spiritual diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas secara optimal.

d. **Diperlukan Kegiatan Promosi dan Propaganda Untuk Penyampaian Informasi**

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan etalase daerah maupun front office Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan pengaruh terhadap pencitraan Provinsi Sumatera Barat oleh pihak-pihak eksternal di

Jakarta dan sekitarnya. Provinsi Sumatera Barat dengan segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi masih sangat membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan promosi melalui Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan, kepercayaan pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun eksternal. Beberapa masalah tersebut diangkat sebagai isu strategis yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Global dan Nasional :

- Pengurangan emisi karbon dengan pengelolaan TMII yang mengusung konsep Green Tourism.

2. Regional dan Daerah :

- Tidak meratanya kualitas SDM Aparatur Pemerintah di bidangnya;
- Status Esselonering yg masih terbatas (Esselon III) sehingga masih sulit dalam mengambil kebijakan yg bersifat teknis dan strategis;
- Digitalisasi pengelolaan informasi yg belum memadai, baik dari segi sarana dan pra sarana maupun SDM.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam penetapan tujuan dan sasaran Badan Penghubung juga mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 2 (dua) Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu :

1. Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya”, dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu :
 - a. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain
 - b. Jumlah promosi potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan 2 (dua) indikator Tujuan yaitu :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja OPD
 - b. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Adapun sasaran Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.

- 2) Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.
- 2) Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan
3. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Sasaran :

- 1) Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.
- 2) Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera.
- 3) Jumlah pelaksanaan pemberian informasi potensi daerah Sumatera Barat.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi

Indikator kinerja sasaran :

- 1). Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi
 - b. Meningkatnya kualitas pelaporan organisasi
 - c. Meningkatkan pengawasan internal organisasi
5. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur. Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penetapan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 mengacu kepada Renstra SKPD Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar untuk mengukur kinerja

Badan Penghubung untuk Tahun 2025. Pada Laporan Kinerja Badan Penghubung Tahun 2025 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Mempertimbangkan sumberdaya, telah ditetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani. 2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100% 100 %
2.	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	1. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan 2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	22 kali 4 kali
3.	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat 2. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali 18 kali
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73.53 (BB)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	79.00 (Baik)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 3.704.399.870,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.502.531.398,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 18.306.931.268,-	

Pada Tahun 2025 Badan Penghubung melakukan perubahan target pada beberapa Indikator Kinerja dari yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis karena telah tercapainya target indikator tersebut pada tahun sebelumnya sehingga penetapan target indikator tersebut telah memenuhi kriteria yang relevan dan *achievable*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

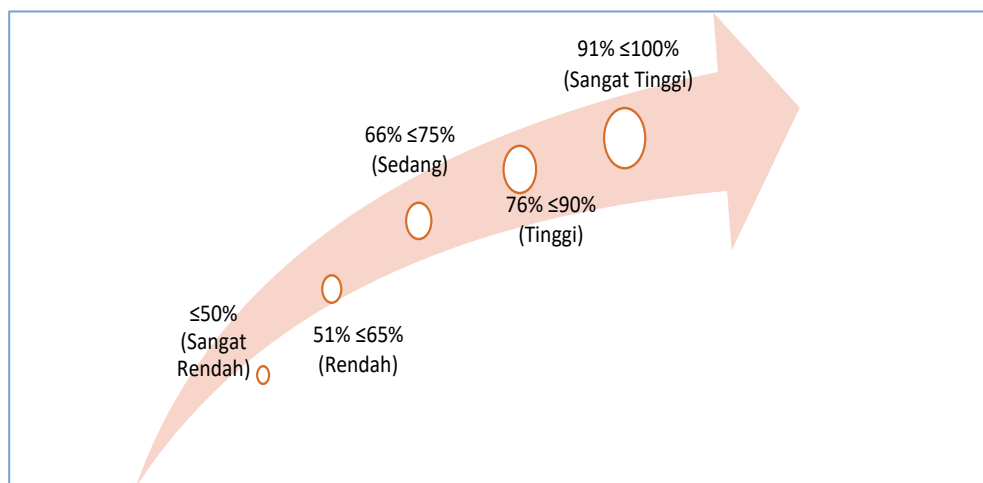
- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. OPD dapat dikatakan berhasil apabila indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat menjadi pembenaran logis atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Kinerja Badan Penghubung

Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2025 merupakan kinerja tahun kelima Renstra Badan Penghubung Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar **89.22% (Tinggi)** yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TAHUN 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	a. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
		b. Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Sasaran 1					100,00%	
2	Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan.	a. Jumlah Aktifitas Koordinasi Dengan Perantau yang dilaksanakan.	22 kali	19 Kali	86,36%	Tinggi
		b. Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	4 kali	2 kali	50,00%	Sangat Rendah
Rata-Rata Capaian Sasaran 2					68,18%	
3	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	a. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	8 kali	66,67%	Sedang
		b. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera	18 kali	14 kali	77,78%	Tinggi
Rata-Rata Capaian Sasaran 3					72,22%	
4	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73,53)	BB (70,05)	95,27%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Sasaran 4					95,27%	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (79,00)	Baik (87.25)	110,44%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Sasaran 5					110,44%	
Rata-Rata Capaian Sasaran 1,2,3,4 & 5					89,22%	Tinggi

Sumber: Badan Penghubung Prov.Sumatera Barat


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja 5 Sasaran pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di tahun 2025 mencapai **89.22%** dengan kategori **Tinggi**. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja **4** (empat) indikator adalah **Sangat Tinggi**, **2** (dua) indikator **Tinggi**, **1** (satu) indikator dengan Capaian **Sedang** dan 1 (satu) indikator dengan Capaian **Sangat Rendah**.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, juga dilakukan analisis dengan membandingkan hasil capaian indikator kinerja utama dengan tahun sebelumnya dalam hal ini tahun 2025 dan juga mengaitkan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:



I. Tujuan:

Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya

Tujuan ini dicapai dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

1. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)

Capaian indikator ini dihitung dengan cara membandingkan antara Realisasi pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain dengan Target pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain dalam persentase.

2. Jumlah Promosi Potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan

Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan antara Realisasi pelaksanaan promosi potensi dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan Target pelaksanaan promosi potensi dan penyebaran informasi daerah dalam persentase.

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Jumlah Promosi Potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan	12 kali	8 kali	66.67%	Sedang
Rata-rata Capaian				83.34%	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat rata-rata pencapaian indikator kinerja utama tujuan tercapai sebanyak **83.34%** dengan kategori **Tinggi**. Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian indikator tujuan adalah sebagai berikut:

1. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)

Formulasi penghitungan Capaian kinerja indikator tujuan ini pada tahun 2025 adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disampaikan bahwa persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi yang artinya seluruh kegiatan, urusan, kepentingan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat /Asing maupun sebaliknya, organisasi Masyarakat Minang baik perantau maupun Mahasiswa Minang pada Asrama yang dikelola telah memenuhi target dan dapat dilayani serta difasilitasi dengan baik oleh Badan Penghubung.

2. Jumlah Promosi Potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan

Formulasi penghitungan Capaian kinerja indikator tujuan ini pada tahun 2025 adalah:

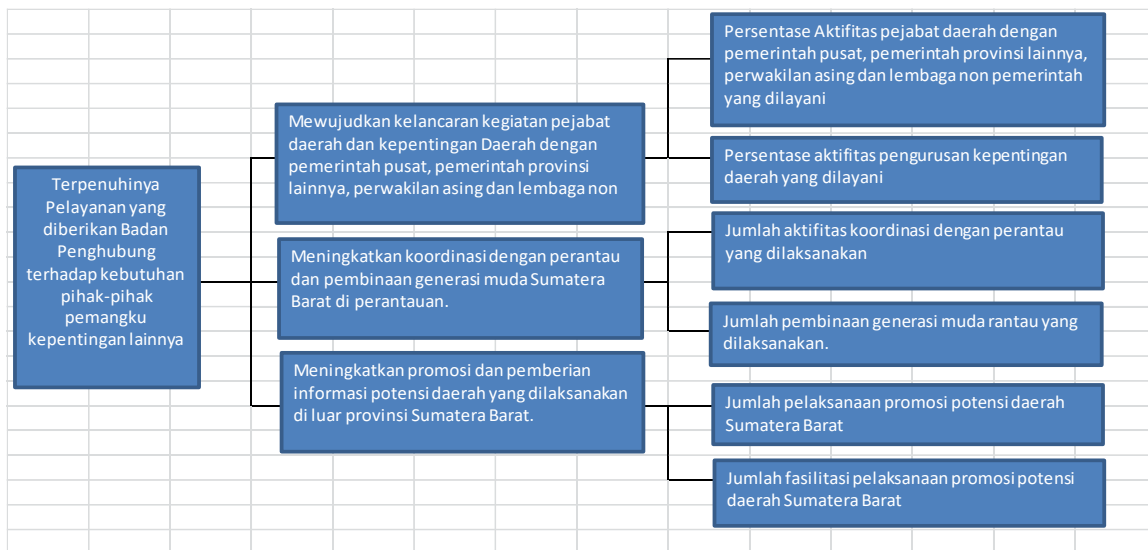
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$66.67\% = \frac{8 \text{ kali}}{12 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2025 Badan Penghubung telah melaksanakan promosi potensi daerah serta penyebarluasan informasi daerah dengan baik sebanyak 8 kali kegiatan yang dilaksanakan secara langsung untuk promosi potensi kesenian daerah dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mencapai 66.67 % dari target yang telah ditetapkan dengan kriteria Sedang.

Tujuan Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya dicapai dengan menetapkan 3 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja. Tujuan, Sasaran dan Indikator dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator



Penjelasan rinci masing-masing Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Penghubung yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1

Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat selaku OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jakarta bertugas untuk menunjang kelancaran koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat dan pengurusan administrasi kepentingannya. Dalam rangka menjalankan fungsinya khususnya dalam hal pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Badan Penghubung berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pihak yang berkepentingan. Dasar Penetapan target indikator Kinerja pada Sasaran ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran strategis pertama ini, ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.
2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.

Capaian kinerja Badan Penghubung dalam rangka melaksanakan pelayanan demi terwujudnya kelancaran kegiatan Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelancaran kegiatan Pejabat Daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2025	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

1. Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani

Dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam hal ini Pelayanan Pejabat dan Tamu Daerah, dalam hal ini Badan Penghubung mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pejabat dan Tamu Daerah dengan baik serta berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2006. Dasar Penetapan target indikator ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2021 – 2026.

1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Indikator
Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2024	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dengan target berdasarkan Rencana Strategis Badan Penghubung yaitu 100% dan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator pelaksanaan pelayanan fasilitasi aktivitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani **Sangat Tinggi (realisasi 100%)** sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini berarti setiap permintaan untuk pelayanan kegiatan Pimpinan Daerah di Jakarta ataupun luar Sumatera Barat dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Bentuk pelayanan dan fasilitasi yang diberikan oleh Badan Penghubung dalam melancarkan kegiatan Pimpinan Daerah selama tahun 2025 dapat dijabarkan yaitu:

a. Jumlah Pejabat Daerah/Tamu Yang Dilayani

Pengukuran kinerja indikator jumlah pelaksanaan pelayanan fasilitas pejabat daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dengan Sub Kegiatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung yang terdiri dari pelayanan pimpinan daerah di Jakarta dan luar Sumatera Barat mulai dari fasilitas mobilisasi dan penugasan

protokol untuk mendampingi dan melayani baik di Jakarta maupun luar Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pimpinan daerah ada yang bersifat rapat koordinasi, kunjungan kerja, penerimaan penghargaan, menghadiri undangan, penyerahan bantuan bencana alam dan pertemuan dengan tokoh, perantau, mahasiswa Minang yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat. Dari pelaksanaan kegiatan dapat dirinci kunjungan ke Jakarta dan luar Jakarta antara lain:

- Rapat-rapat koordinasi dan pertemuan yang bersifat nasional di Jakarta
- Penerimaan penghargaan di Jakarta dan Surabaya
- Pertemuan dengan tokoh tokoh masyarakat Minang dan Pengusaha di Jabodetabek
- Kegiatan menghadiri rapat-rapat koordinasi kegiatan di Luar Jakarta yaitu rapat-rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja, Penerimaan Penghargaan, event-event Nasional, Pertemuan dengan tokoh masyarakat dan organisasi perantau/ Masyarakat Minang, /mahasiswa asal Minang, serta daerah yang dikunjungi antara lain, Medan, Magelang, Makassar Sulawesi Selatan, Bali dan
- Pertemuan dengan Perusahaan Paragon Group
- Pelayanan pimpinan daerah di luar Sumatera Barat.

b. Jumlah Konsultasi Pemerintah Daerah Yang Difasilitasi

Sehubungan dengan fungsi Badan Penghubung dalam hal fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kali fasilitasi konsultasi pemerintah daerah yang diantaranya terdiri dari :

- Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Kedutaan Besar Arab Saudi
- Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Lembaga BPH Migas
- Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan Hutama Karya untuk Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.

c. Jumlah Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang dilaksanakan

Dalam melaksanakan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkat nya dalam pelaksanaan tugas diluar provinsi Sumatera Barat, Badan Penghubung melaksanakan publikasi kegiatan pimpinan daerah. Pada Tahun 2025, kegiatan publikasi media terlaksana sebanyak 62 kali. Publikasi kegiatan pimpinan daerah ini di *upload* pada portal media resmi Sumatera Barat yaitu <https://www.sumbarprov.go.id/> dan *website* Badan Penghubung <https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/> serta instagram Badan Penghubung Sumatera Barat <https://www.instagram.com/badanpenghubungsumbar>.

Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pelayanan kegiatan pimpinan daerah :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{170 \text{ kali} + 3 \text{ kali} + 62 \text{ kali}}{235 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat daerah dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani dari Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua kegiatan pimpinan daerah dapat difasilitasi dan dilaksanakan pelayanan dengan baik.

1.2. Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

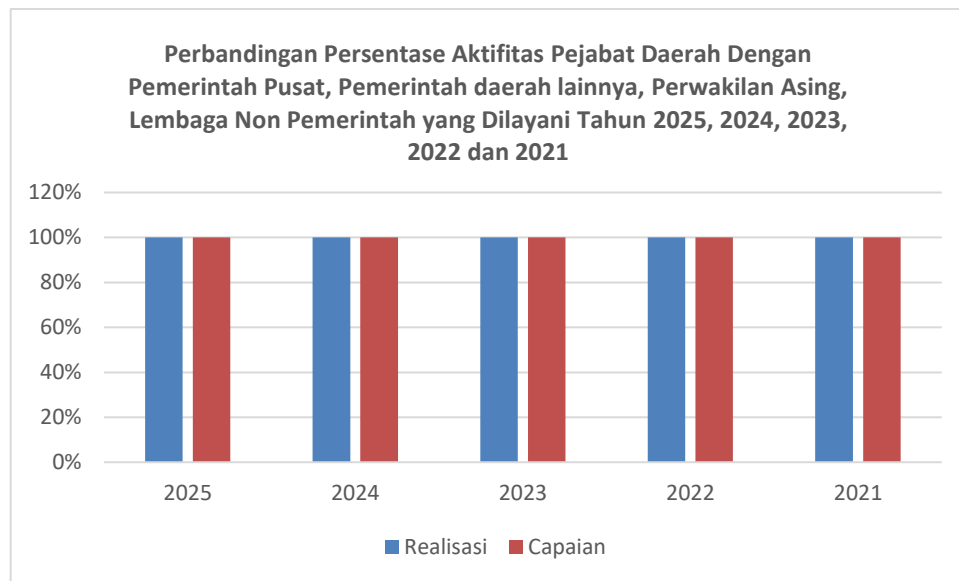
Tabel 3.5
Perbandingan Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani Tahun 2025, 2024, 2023, 2022 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2022 (n-2)	CAPAIAN 2021 (n-3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan Capaian tahun-tahun sebelumnya yang juga memenuhi target 100%, pada tahun 2025 intensitas kegiatan pelayanan Pimpinan Daerah meningkat karena seiringan dengan padatnya jadwal dan undangan pimpinan Daerah yang harus dilayani dan difasilitasi, baik yang dilaksanakan di Jakarta ataupun luar Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menambah permintaan intensitas pelayanan sehingga harus dibarengi dengan penambahan jumlah tenaga pelayanan pimpinan daerah (protokol dan sopir) yang *capable* dari *Outsourcing* sehingga memadai untuk mengimbangi padatnya jadwal pimpinan yang harus dilayani. Selain itu untuk menambah kualitas pelayanan pimpinan dari sarana prasarana di luar Jabodetabek juga disediakan belanja sewa sarana mobilitas. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran ini tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah:

Grafik 3.1



Sumber : Data diolah

1.3 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan target jangka Menengah

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini dengan target jangka menengah adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/ RPJMD	REALISASI TAHUN 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	0%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra telah sama dengan target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan Badan Penghubung selaku OPD Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dengan salah satu tugas pokoknya adalah pelayanan dan fasilitasi kegiatan pimpinan daerah di luar Sumatera Barat.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan artian karena semua kegiatan pimpinan daerah dapat difasilitasi dan dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani didukung beberapa faktor antara lain :

- a). Peningkatan intensitas kegiatan pelayanan Pimpinan Daerah sehubungan dengan padatnya jadwal dan undangan Pimpinan Daerah yang harus dilayani dan difasilitasi baik yang dilaksanakan di Jakarta ataupun luar Provinsi Sumatera Barat yang diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga pelayanan pimpinan daerah (protokol dan sopir) yang *capable* dari tenaga *outsourcing* sehingga memadai untuk pelayanan Pejabat dan Tamu Daerah. Personil pelayanan pada Seksi Humas Protokol dan Pelayanan yang saat ini berjumlah 11 orang ASN serta didukung 20 orang tenaga *outsourcing* yang terdiri dari tenaga sopir dan protokol pelayanan yang bertugas dalam pelayanan pejabat dan pimpinan daerah Provinsi Sumatera Barat di luar provinsi.
- b). Sarana dan Prasarana yang memadai
Ketersediaan Asset Badan Penghubung berupa kendaraan dinas operasional yang berada dalam kondisi baik merupakan salah satu sarana utama dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan kelancaran aktivitas pejabat dan pimpinan daerah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu untuk menunjang kelancaran Kegiatan Pimpinan Atau Pejabat daerah di luar Jabodetabek juga dilaksanakan sewa sarana mobilitas.
- c). Ketersediaan Anggaran yang efektif
Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi

Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani dengan target 100%, pada tahun 2025 tercapai sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Untuk mencapai sasaran ini Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Program Pelayanan Penghubung terfokus pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani, Badan Penghubung melaksanakan Program Pelayanan Penghubung dengan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dengan anggaran APBDP total sebesar Rp 877.382.000,- dengan realisasi sebesar Rp 600.986.294,00 atau sebesar 68.50%. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa
Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	877.382.000	600.986.294	68,50%	276.395.706

Sumber: Data Realisasi Badan Penghubung 2025

Dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan Anggaran pada Sub Kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja adalah sebesar 31.50%. Efisiensi yang dilakukan antara lain:

- ✓ Efisiensi Belanja Sewa Sarana Mobilitas yaitu sewa Kendaraan Pimpinan Daerah diluar

Jabodetabek yang direalisasikan sesuai kebutuhan.

- ✓ Efisiensi Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan karena pencairan Anggaran sesuai dengan kebutuhan publikasi kegiatan Pimpinan Daerah selama Tahun 2025 serta Belanja Jasa Jalan/Tol dengan cara pengaturan kegiatan Pimpinan saat di luar Sumatera Barat.
- ✓ Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disesuaikan dengan acara dan kedatangan Pimpinan Daerah.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 877.382.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) “ Maksimal Capaian Kinerja 120%”

RA = Realisasi Anggaran = Rp 600.986.294,-

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{Rp } 877.382.000 \times 100\%) - \text{Rp } 519.588.243}{\text{Rp } 877.382.000} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 276.395.706}{\text{Rp } 877.382.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{0,32\%} \end{aligned}$$

Dari jumlah total anggaran sebesar Rp 877.382.000,- terealisasi sebesar Rp 600.986.294,- atau sekitar **68.50%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 276.395.706,- atau sebesar 31.50%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani adalah **100%** lebih tinggi dari realisasi Anggaran (**68.50%**) dengan tingkat efisiensi **0.32%** dan **Nilai Efisiensi setelah Konversi adalah 128.76% (dibulatkan menjadi 100%)**.

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 0.32% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 877.382.000,- yang terealisasi sebesar Rp 600.986.294,-,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja sebesar 100.00%.

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani di dukung oleh Program Pelayanan Penghubung pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan

Penghubung yang secara keseluruhannya pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik (Realisasi keuangan masing-masing 68.50% serta Fisik 100%), hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik/Keuangan Kegiatan Badan Penghubung 2025

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Pertama dari Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua kegiatan pimpinan daerah dapat difasilitasi dan dilaksanakan dengan baik.

2. Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah Yang Dilayani

Dalam lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung serta fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai fungsi Badan Penghubung dan dalam rangka pemberian dukungan teknis untuk koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Badan Penghubung melaksanakan beberapa urusan antara lain:

- Pengurusan Kepentingan dan Surat-surat Dinas dari Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Pusat.
- Pengurusan Surat Keputusan (SK) Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi, konsultasi dan pengambilan blanko e KTP untuk keperluan kependudukan Provinsi Sumatera Barat ke DUKCAPIL serta KTP elektronik WNA.
- Fasilitasi dalam mengatasi permasalahan Perantau Minang yaitu pemulangan Warga Negara Indonesia di daerah konflik dengan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, tahun 2024 ini berhasil membantu 4 (empat) orang dari Lebanon pulang ke Daerah asal mereka di Provinsi Sumatera Barat.

Dasar Penetapan Target Indikator ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2021-2026.

2.1.Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Persentase Capaian Indikator Kinerja Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2025	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah Yang Dilayani tergolong ***Sangat Tinggi (Realisasi 100%)*** sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran indikator ini dilaksanakan pada Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Sub Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka pengurusan kepentingan daerah di Pusat. Bentuk pengurusan kepentingan daerah yang diberikan oleh Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025 dapat dijabarkan yaitu:

a. Jumlah Surat Izin dan Surat Dinas Yang Difasilitasi

Salah satu tugas rutin yang dilaksanakan adalah pengurusan izin keluar negeri bagi pejabat Pemerintah Sumatera Barat. Pada Tahun 2025 Badan Penghubung telah melakukan Pengurusan surat izin perjalanan luar negeri sebanyak **18 (delapan belas)** kali. Selain itu terlaksana juga Fasilitasi Pengurusan Surat Dinas terhadap Provinsi serta Kabupaten dan Kota sebanyak **99 (Sembilan puluh sembilan)** kali.

b. Jumlah Keputusan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yang diurus

Badan Penghubung melalui Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat juga melakukan fasilitasi pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2025 Badan Penghubung telah berhasil membantu fasilitasi pengurusan **34 (tiga puluh empat)** Surat Keputusan (SK) Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dan Pembahasan Peraturan Gubernur serta Surat dari Kementrian Dalam Negeri. Jumlah Surat Keputusan yang diurus dihitung berdasarkan Surat Keputusan yang diambil dan diserahkan OPD terkait. Realisasi pengurusan Surat Keputusan ini antara lain Surat Keputusan Pergantian

Antar Waktu DPRD Provinsi, Surat Keputusan Pensiun Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Barat, Surat Keputusan Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Penjabat Bupati, Walikota dan Sekda di Provinsi Sumatera Barat.

Semua Surat Keputusan dapat dibantu pengurusannya dan berhasil difasilitasi, dengan demikian dapat dilihat Capaian Kinerja Indikator sasaran strategis ini:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{117 \text{ Surat Izin (Dinas)} + 34 \text{ Surat Keputusan}}{117 \text{ Surat Izin (Dinas)} + 34 \text{ Surat Keputusan}} \times 100\%$$

Dari Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja kedua dari Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dapat difasilitasi dan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Pertama Badan Penghubung dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua pengurusan administrasi kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat dapat difasilitasi dan berhasil dilaksanakan dengan baik dengan Realisasi Capaian **100% (Sangat Tinggi)**.

2.2 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani Tahun 2025, 2024,2023, 2022 dan 2021

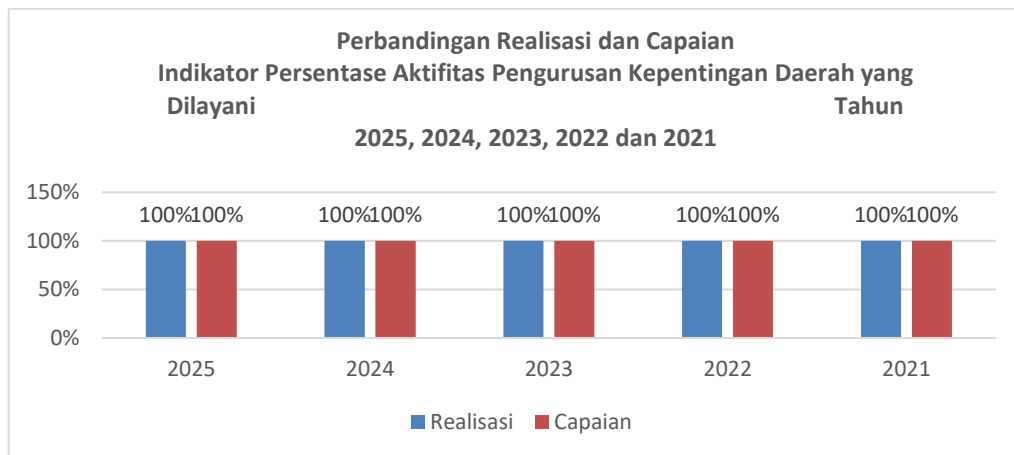
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2025	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2023 (n-1)	CAPAIAN 2022 (n-2)	CAPAIAN 2021 (n-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2024, 2023,2022, 2021 dan Hasil Analisa

Dibandingkan realisasi tahun 2024 lalu (fasilitasi pengurusan Surat Izin dan Dinas luar negeri

sebanyak 120 kali dan fasilitasi pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah sebanyak 16 Surat) terjadi kenaikan intensitas jumlah pengurusan surat keputusan dan izin dari Pemerintah Daerah menjadi total 117 kali pengurusan Izin Luar Negeri dan Surat Dinas serta 34 Surat Keputusan dikarenakan terdapat Surat Keputusan Pengangkatan dan Pensiun Pejabat Daerah Hasil Pilkada Tahun 2024 yang keluar di Tahun 2025 dan artinya semua permintaan pengurusan kepentingan daerah yaitu izin dan kepentingan daerah dapat dilayani dengan baik. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran ini tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah:

Grafik 3.2



Sumber : Data diolah

2.3 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	0%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra telah sama dengan target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan Badan Penghubung selaku OPD Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dengan salah satu fungsinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan pelayanan umum bidang penghubung yakni pengurusan setiap kepentingan daerah pada Pemerintah Pusat.

2.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

2.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani tahun 2025 terealisasi sebesar **100%** dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan artian karena semua permintaan pengurusan kepentingan daerah, baik itu surat izin ataupun surat keputusan pemerintah daerah ke pemerintah pusat dapat diselesaikan dengan baik. Faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Dengan adanya sistem digitalisasi pada Kementerian untuk pengurusan SK, surat-surat izin, pengurusan paspor dan rekomendasi visa (SIOLA, SIMPEL, AEPSILON) dapat memudahkan pemerintah dalam menjalankan proses koordinasi, konsultasi dan pelayanan. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta pada Kementrian Sekretariat Negara dalam hal pengurusan izin perjalanan dinas dan cuti pejabat daerah ke luar negeri termasuk pasport dan visa ke luar negeri bagi para pejabat/pimpinan daerah di Sumatera Barat secara online dan terhubung.
- b). Koordinasi yang baik dengan Kementrian dan Lembaga di Pemerintah Pusat dalam hal pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat.
- c). Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani didukung oleh A S N personel Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Hubungan Antar Lembaga yang telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta pada Kementrian Sekretariat Negara dalam hal pengurusan izin perjalanan dinas dan cuti pejabat daerah ke luar negeri termasuk pasport dan visa ke luar negeri bagi para pejabat/pimpinan daerah di Sumatera Barat.

- d). Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan

adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

e). Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani dengan target 100% pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 236.991.480,- dengan realisasi sebesar Rp 225.118.850,- atau sebesar **94,99%**. Anggaran ini terletak pada Program Pelayanan Penghubung pada Sub Kegiatan yaitu Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.

2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani, Badan Penghubung melaksanakan Program Pelayanan Penghubung dengan satu Sub Kegiatan yaitu Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat dengan Anggaran APBD-P total sebesar Rp 236.991.460,- dengan realisasi sebesar Rp 226.153.850,- atau sebesar **95.43 %**. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan.

Berikut pada tabel dibawah dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan daerah yang dilayani. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah Yang dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				

	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	236.991.460	226.153.850	95.43%	10.837.610
--	---	-------------	-------------	--------	------------

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Realisasi Capaian Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah Yang dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelambagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Persentase aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani tercapai sesuai target sebanyak 100% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 236.991.460,-

CK = Capaian Kinerja (%) “ Maksimal Capaian Kinerja 120%”

RA = Realisasi Anggaran = Rp 226.153.850,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp236.991.460 \times 100\%) - Rp 226.153.850}{Rp 236.991.460} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,05\%$$

Dari jumlah total anggaran sebesar Rp 236.991.460,- terealisasi sebesar Rp 226.153.850,- atau

sekitar **95.43 %**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 10.837.610,- atau sebesar **4.57%**. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani adalah **100%** yaitu lebih tinggi dari realisasi Anggaran (**95.43%**) dengan tingkat efisiensi **0.05%**.

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar **0.05%** atau senilai **61.43%** (dalam Nilai Efisiensi Konversi) dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 236.991.460,- yang terealisasi sebesar Rp 226.153.850,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja sebesar 100.00%.

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani di dukung oleh Program Pelayanan Penghubung, Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat yang secara keseluruhannya pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik (Realisasi keuangan masing-masing 95.43% dan Fisik 100%, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan peresentase dan fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik/Kuangan Kegiatan Badan Penghubung 2025

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Kedua dari Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua urusan kepentingan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dapat difasilitasi dengan baik.



Sasaran Strategis 2

Meningkatkan koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di perantauan

Sumber Daya Perantau Minang merupakan potensi kekuatan yang dimiliki Provinsi untuk mengembangkan potensi daerah Sumatera Barat. Oleh karena itu Badan Penghubung terus menjalin komunikasi yang intens dengan Bakor/Paguyuban Perantau Minang yang ada/berpusat di Jakarta atau luar Provinsi lainnya, selain itu Badan Penghubung juga intens membina dan menjalin komunikasi dengan perantau yang berasal dari Generasi muda Minang. Dasar penetapan target Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2021-2026 dan penyesuaian penetapan target tahun ini dengan memperhatikan Realisasi Capaian Indikator Kinerja tahun sebelumnya agar *achievable*, menantang dan realistis. Sasaran ini dicapai dengan menetapkan dua indikator, yaitu:

Tabel 3.15

Realisasi Kinerja Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan pada Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2025	Kategori
		2025			
		Target	Realisasi	%	
1.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	22 kali	19 kali	86.36 %	Tinggi
2.	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	2 kali	50,00 %	Sangat Rendah

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Untuk penjelasan lebih terperinci capaian indikator kinerja masing-masing sasaran Strategis “Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di Perantauan” dijelaskan lebih lanjut pada bab ini:

1. Jumlah Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan

Badan Penghubung merupakan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di perantauan dan berkewajiban melakukan koordinasi yang baik dengan Bakor/Paguyuban Perantau Minang yang berpusat di Jakarta atau Provinsi Lainnya. Untuk dasar penetapan target Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ini di tahun 2025 dilaksanakan penyesuaian dari Renstra karena pada tahun 2024 Realisasi Capaian telah melebihi target Renstra yang

ditetapkan. Oleh karena itu dengan memperhatikan Realisasi Capaian Indikator Kinerja tahun sebelumnya, agar *achievable*, menantang dan realistis, maka ditetapkan target sebanyak 22 Kali. Realisasi target indikator pada Sasaran ini tercapai sebanyak 19 Kali. Jumlah aktivitas koordinasi dengan organisasi masyarakat perantau yang dilibatkan dihitung berdasarkan jumlah kegiatan yang melibatkan organisasi masyarakat Minang di rantau. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk non formal, diantaranya dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi dengan Organisasi perantau yang berada di Luar Sumatera Barat, seperti Fasilitasi Pertemuan Pimpinan Daerah dengan IKM yang berada di Malang, Semarang, Bandung, dan daerah-daerah lainnya. Jumlah koordinasi yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebanyak 19 kali.

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja Indikator
Jumlah Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2025	Kategori
		2025			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	22 kali	19 kali	86.36 %	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan tahun 2025 mencapai **86.36%** dari target yang ditetapkan dan termasuk kategori **Tinggi**. Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan koordinasi berdasarkan undangan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Minang ataupun paguyuban/ BAKOR Masyarakat Minang di perantauan. Badan Penghubung juga terus melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga, Ikatan Keluarga Minang baik di Jabodetabek maupun luar Jabodetabek terkait dalam pelaksanaan kegiatan juga merupakan faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi dan mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Organisasi masyarakat Minang di perantauan, yaitu antara lain :

1. Pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Walikota Solok, Bupati Solok dan Bupati Solok Selatan bersama organisasi Solok Saiyo Sakato, KBKS, PKKS, IKAMASS di Hotel Balairung Tanggal 19 Februari 2025



2. Pertemuan dengan Pengurus IKMBS (Bekasi) tanggal 22 Februari 2025



3. Pertemuan dan Berbuka puasa dengan Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solok tanggal 14 Maret 2025 di Hotel Balairung



4. Kegiatan Minang Day di Masjid Istiqlal Jakarta di hadiri oleh Organisasi Bundo Kandung Jakarta, Solok Saiyo Sakato, IKAMASS, KBKS, PKKS tanggal 18 Maret 2025



5. Silaturahmi Budaya minang dan Halal bi Halal IKM tgl 20 April 2025



6. Rapat Solok Saiyo Sakato tgl 20 April 2025



7. Pertemuan Gubernur Sumbar dengan Forum Masyarakat tgl 15 April 2025



8. Menghadiri Halal bi Halal dan silaturahmi DPW-V Sulit Air Sepakat tgl 27 April 2025



9. Menghadiri Halal bi Halal Ikatan Keluarga Pasaman tgl 3 Mei 2025



10. Menghadiri Halal bi Halal Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau DKI Jakarta tgl 24 April 2025



11. Menghadiri Halal bi Halal dan Pelantikan Lembaga DARAM (Da'I Ranah Minang) tgl 4 Mei 2025



12. Pengukuhan pengurusan Solok Saiyo Sakato dan Halal bi Halal tgl 17 Mei 2025



13. Menghadiri Munas I Pemilihan Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang tgl 23 Mei 2025



14. Menghadiri Halal bi Halal Ikatan Alumni Universitas Andalas Jabodetabek tgl 31 Mei 2025



15. Pelantikan dan Pengukuhan pengurus Ikatan Minang Baiyo tgl 28 Juni 2025



16. Pertemuan dengan Ketua DPW IKM Jawa Barat, Ketua Pembina PMM Rumah Gadang tgl 23 Agustus 2025 di Bandung



17. Menghadiri Milad ke III Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau DKI Jakarta 20 November 2025 di Jakarta



18. Pertemuan dengan Persatuan Perantau Minang di Anjungan Sumatera Barat Tanggal 8 Desember 2025



19. Pertemuan dengan Persatuan Perantau Minang di anjungan Sumatera Barat membahas penggalangan dana untuk korban bencana Sumatera Barat tanggal 10 Desember 2025



Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat dari jumlah pelaksanaan aktivitas koordinasi dengan perantau :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$86,36\% = \frac{19 \text{ kali}}{22 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Pertama pada Sasaran Strategis Kedua Badan Penghubung melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan aktifitas Koordinasi dengan perantau tercapai sebanyak 86.36% dengan kategori “Tinggi”.

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

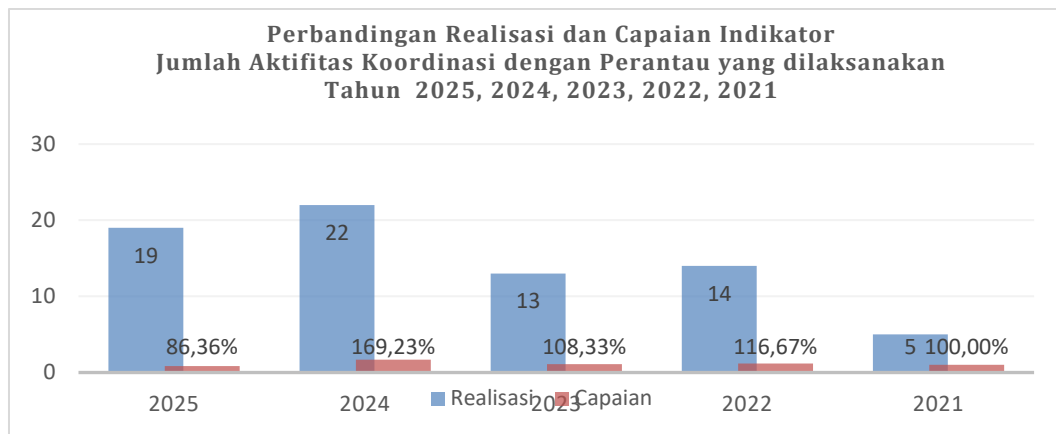
Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Jumlah Aktifitas Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan
Tahun 2025, 2024, 2023, 2022 dan 2021

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2025 (n)	Capaian Tahun 2024 (n-1)	Capaian Tahun 2023 (n-2)	Capaian Tahun 2022 (n-3)	Capaian Tahun 2021 (n-4)
		2025						
		Target	Realisasi	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	22 kali	19 kali	86,36%	169,23%	108.33%	116,67%	100,00%

Sumber: Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2024,2023, 2022, 2021 dan Hasil Analisa

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021, pelaksanaan kegiatan tahun 2025 terlaksana dengan baik dan meningkat secara kuantitas dikarenakan realisasi kegiatan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung baik secara formal maupun non formal serta undangan pertemuan untuk menghadiri acara dari Organisasi Perantau Minang yang diterima oleh Badan Penghubung. Namun jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran ini Tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah:

Grafik 3.3



1.3 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakansampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12 kali	19 kali	158,33%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.18 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra telah melebihi target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan koordinasi tahun 2025 dapat dikatakan lebih banyak terlaksana, Badan Penghubung juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lembaga maupun organisasi perantau Minang terkait dalam pelaksanaan kegiatan juga merupakan faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau tahun 2025 terealisasi sebesar 86,36% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori Tinggi, hal ini disebabkan faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Komunikasi yang efektif dengan Perantau dan Organisasi Masyarakat Minang di Rantau sehingga Badan Penghubung lebih banyak dikenal, bahkan beberapa Organisasi seperti Bundo Kandung DKI Jakarta juga beberapa kali difasilitasi dalam melakukan pertemuan di Ruang Rapat kantor Badan Penghubung.
- b). Koordinasi yang baik dengan Organisasi perantau Minang dalam rangka mengumpulkan database untuk perantau Minang (e-Rantau).

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Aktivitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Aktvitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan didukung oleh 2 orang ASN Analis Hubungan Antar Lembaga pada Seksi Hubungan Antar Lembaga yang bertugas untuk menjalin komunikasi dengan perantau Minang serta organisasi masyarakat Minang yang berada di Jabodetabek serta luar Provinsi Sumatera Barat.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yaitu menjalin komunikasi yang efektif dengan perantau Minang di luar Provinsi Sumatera Barat.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Aktivitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan dengan target 22 kali pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 19 kali dengan tingkat capaian sebesar 86,36%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 236.991.460,- dengan realisasi sebesar Rp 226.153.850,- atau sebesar 95.43%. Anggaran ini tersebar pada Program Pelayanan Penghubung pada Sub Kegiatan yaitu Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 236.991.460,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 86.36% "Maksimal Capaian Kinerja 120%"

RA = Realisasi Anggaran = Rp 226.153.850,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp.236.991.460 \times 86.36\%) - Rp.226.153.850}{Rp 236.991.460} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = - 0.09\%$$

Dari jumlah total anggaran sebesar Rp 236.991.460 terealisasi sebesar Rp 226.153.850,- atau sekitar **95.43 %** dan sisa sebesar Rp 10.837.610 atau sekitar **4.57%**. Jika membandingkan antara Capaian Kinerja Indikator Jumlah Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan adalah **86.36%** lebih rendah dari realisasi Anggaran (**95.43%**) dengan Tingkat efisiensi sebesar **-0.09%** maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target Indikator Kinerja Badan Penghubung terjadi inefisiensi sebesar **-0.09%** atau senilai **27.33%** dalam Nilai Efisiensi konversi dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 236.991.460,- yang terealisasi sebesar Rp 226.153.850,- untuk mendukung pencapaian kinerja

indikator sebesar 86.36%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut.

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Persentase Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	236.991.460	236.153.850	95.43%	10.837.610

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah Aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan tercapai 86.36% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

2. Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau yang dilaksanakan

Badan Penghubung mengelola 3 Asrama Mahasiswa yaitu Asrama Mahasiswa Bogor, Asrama Mahasiswa Putra Merapi Singgalang Yogyakarta, Asrama Mahasiswa Putri Bundo Kandung Yogyakarta. Jumlah mahasiswa/i diasrama yang dilayani dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang menghuni asrama, yaitu sejumlah 34 orang di Asrama Putra Merapi Singgalang Yogyakarta, 29 orang di Asrama Putri Bundo Kandung Yogyakarta dan 72 orang di Asrama Mahasiswa Bogor (30 orang Putra dan 42 orang Putri). Kegiatan Pembinaan Generasi Muda rantau ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Bogor dan Bandung. Jawa Barat dengan mendatangkan Narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, Ketua Umum DPW Ikatan Keluarga Minang Jawa Barat serta Kepala Badan Penghubung dan mengangkat tema pengembangan kapasitas Generasi Muda Perantauan untuk masa depan Sumatera Barat. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2021-2026.

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Pencapaian Kinerja Indikator
Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau yang dilaksanakan

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2025	Kategori
		2025			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	2 kali	50%	Sangat Rendah

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Pada tahun 2025 Badan Penghubung melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan pembinaan Generasi Muda yaitu:

1. Sosialisasi Pembinaan Generasi Muda di Bandung 23 Agustus 2025



2. Sosialisasi Pembinaan Generasi Muda di Bogor tanggal 30 Agustus 2025



Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat dari jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan pada Tahun 2025 :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$50.00\% = \frac{2 \text{ kali}}{4 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kedua pada Sasaran Strategis Kedua Badan Penghubung tidak mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan Pembinaan Generasi Muda Rantau hanya tercapai sebanyak 50% dengan kategori “**Sangat Rendah**”.

2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun - tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

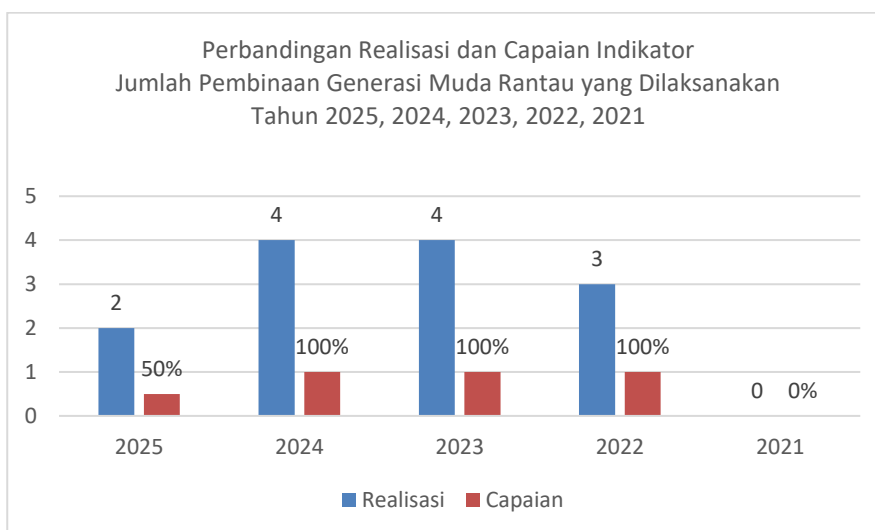
Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2025 (n)	Capaian Tahun 2024 (n-1)	Capaian Tahun 2023 (n-2)	Capaian Tahun 2022 (n-3)	Capaian Tahun 2021 (n-4)
		2025						
		Target	Realisasi	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	2 kali	50,00%	100%	100%	100%	-

Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang terlaksana sebanyak 4 kali, pada tahun ini terdapat penurunan realisasi pelaksanaan Pembinaan Generasi Muda yang disebabkan karena pengurangan Anggaran terkait Efisiensi Anggaran, baik dari tahun lalu maupun DPA Murni 2025 tidak diiringi dengan penyesuaian pengurangan target capaian kinerja 2025. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian Badan Penghubung di masa yang akan datang untuk melakukan revisi target indikator apabila terdapat pengurangan Anggaran kegiatan yang ditetapkan untuk pencapaian target dimaksud. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran ini tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Grafik dibawah:

Grafik 3.4



Sumber : Data diolah

Tahun 2025 Badan Penghubung hanya dapat melaksanakan Kegiatan Pembinaan Generasi Muda Minang di Perantauan dengan jumlah 2 (dua) kali pelaksanaan, berkurang dari jumlah realisasi kali pelaksanaan Tahun sebelumnya 2024.

2.3 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanan dibandingkan dengan Target periode akhir Renstra sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	2 kali	50%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.23 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra turun 50% dari target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berkaitan dengan pengurangan Anggaran karena Efisiensi sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 6 Tahun 2025. Namun demikian, Badan Penghubung juga terus melakukan koordinasi sekaligus pembinaan rutin terhadap Mahasiswa Minang yang berada di Asrama Yogyakarta dan Bogor serta melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung serta mahasiswa Minang rantau di Kota/Provinsi lain seperti Malang, Semarang dan Bogor Jawa Barat .

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah pembinaan generasi muda rantau tahun 2025 terealisasi sebesar 50% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori Rendah, beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berkaitan dengan pengurangan Anggaran karena Efisiensi sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 6 Tahun 2025 yang tidak diiringi dengan pengurangan target kinerja.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan didukung oleh 1 orang ASN Pengolah Data Kelembagaan pada Seksi Hubungan Antar Lembaga yang bertugas untuk menjalin komunikasi dan melakukan pembinaan dengan generasi muda Minang di Rantau.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yaitu melakukan pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan dengan target 4 kali pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 2 kali dengan tingkat capaian sebesar 50.00%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 236.991.460,- dengan realisasi sebesar Rp 226.153.850,- atau sebesar 95.43%. Anggaran ini tersebar pada Program Pelayanan Penghubung pada Sub Kegiatan yaitu Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan

analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 236.991.460,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 50.00%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 226.153.850,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp236.991.460 \times 50.00\%) - Rp.226.153.850}{Rp 236.991.460} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = - 0.45 \%$$

Dari jumlah Total Anggaran sebesar Rp 236.991.460 dan terealisasi sebesar Rp 226.153.850,- atau sekitar **95.43 %**, hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan Anggaran sebesar Rp 10.837.610 atau sebesar **4.57%**. Jika membandingkan antara Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau yang dilaksanakan adalah **50%** lebih rendah dari realisasi anggaran (**95.43 %**) dengan tingkat inefisiensi **-0.45 %**. Berdasarkan Analisa tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian target Indikator Kinerja Badan Penghubung terjadi inefisiensi sebesar **-0.45%** atau senilai **-63.57%** dalam Nilai Efisiensi konversi dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 236.991.460,- yang terealisasi sebesar Rp 226.153.850,- untuk mendukung pencapaian kinerja indikator sebesar 50.00%.

Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau yang Dilaksanakan didukung oleh Program Pelayanan Penghubung, Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat yang realisasinya dapat dilihat pada Tabel dibawah :

Tabel 3.24

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Jumlah pembinaan Generasi muda rantau yang dilaksanakan**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	236.991.460	225.118.850	95.43%	10.837.610

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2025


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Efisiensi yang dilaksanakan adalah efisiensi Anggaran Belanja Makan Minum Tamu yang direalisasikan sesuai kebutuhan. Pencapaian indikator kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Pembinaan Generasi Muda Rantau Sumatera Barat	4 kali	2 kali	50%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan tercapai sesuai dengan target sebanyak 100% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja



Sasaran Strategis 3

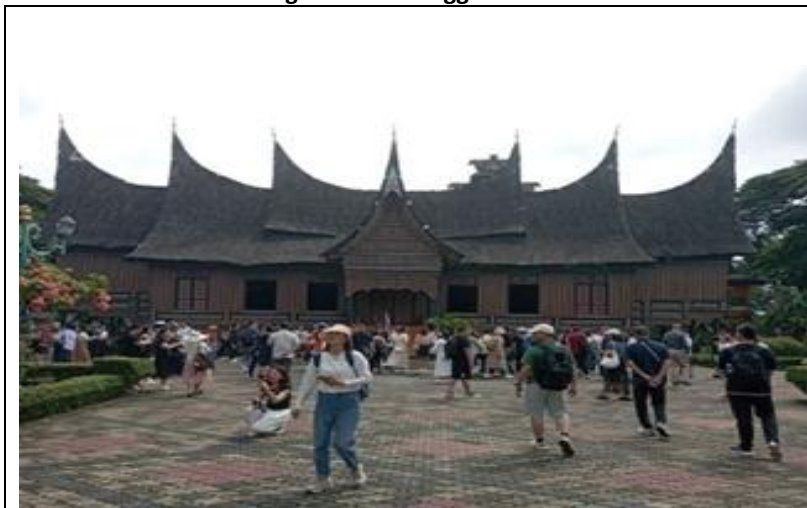
Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan sumber daya melimpah baik di bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, kuliner, kependudukan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Sumber daya alam Sumatera Barat yang sangat produktif menjadikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan memiliki potensi yang baik jika dikembangkan dan dikelola dengan baik. Bermodal dengan keanekaragaman jumlah *home industry local* serta potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat, maka untuk memperkenalkan sekaligus menjualnya kita perlu pengembangan daerah terutama pariwisata. Hal ini memerlukan upaya yang strategis dalam melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan pameran di daerah-daerah destinasi wisata unggulan dan populer dikalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam usaha menginformasikan serta menjual Potensi Unggulan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat kepada masyarakat luas dan salah satu usaha dalam meningkatkan arus investasi ke Sumatera Barat, pada tahun 2025 Badan Penghubung

melaksanakan 2 (dua) kegiatan **Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya** serta **Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya**.

Anjungan Sumatera Barat TMII adalah salah satu Sarana untuk mempromosikan Seni, Budaya, Pariwisata dan Kuliner yang terdapat di Sumatera Barat. Karena Anjungan merupakan *Show Window* dari Sumatera Barat dalam mengenalkan dan sekaligus mempromosikan kekayaan alam, seni budaya, kuliner kepada dunia. Anjungan Sumatera Barat merupakan salah satu Anjungan favorit yang banyak didatangi oleh para pengunjung baik Wisatawan Lokal maupun Wisatawan Mancanegara. Seiring dengan revitalisasi yang dilakukan oleh Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan Sumatera Barat juga melakukan perbaikan dan peremajaan sarana prasarana sehingga makin menampilkan ciri khas tiap daerah, mulai dari rumah adat, pakaian adat, ikon daerah tersebut, hingga kuliner khas daerah. Beberapa kunjungan rombongan sekolah, universitas atau delegasi mancanegara yang diterima di Anjungan Sumatera Barat Tahun 2025 antara lain:

Tour Agent China tanggal 8 Januari 2025



SD Islam Darul Ulum Depok



SD Tarasalfia



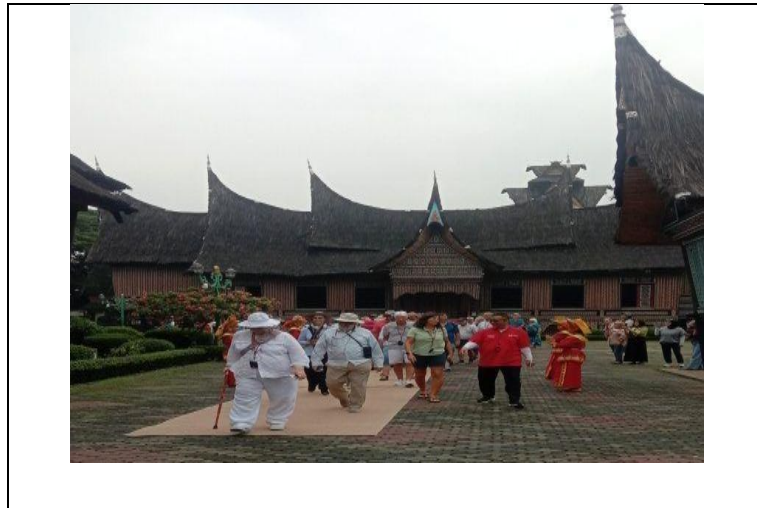
Indonesian Heritage Society



Kunjungan dari Vicking Sky



Cunrad King Elizabeth



Univ Pelita Harapan



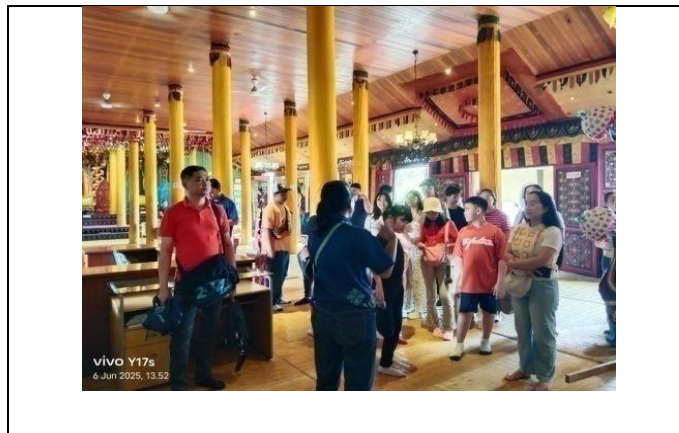
Delegasi Duber Algeria



Delegasi Ministry Defense Iran



Young Ambassador Filipina



Deputi General Kingdon of Thai



Kunjungan Putri Indonesia (Sumbar)



Delegasi US Marsoc & Denjaka TNI AL



Pada tahun 2025 ini kita telah mencatat jumlah pengunjung yang datang ke Anjungan Sumatera Barat sebanyak :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Wisatawan Mancanegara | = 7.770 orang |
| 2. Wisatawan Lokal/Domestik | = 15.919 orang |
| 3. Mahasiswa/Pelajar | = 19.157 orang |

**Data kunjungan terlampir*

Mulai Tahun akhir tahun 2022, telah dilaksanakan penghitungan jumlah pengunjung Anjungan Sumatera Barat dengan cara Scan Barcode seperti dibawah ini:



Dalam rangka menyebarluaskan informasi dalam pengembangan/ sarana promosi sumber daya/ potensi yang ada di Sumatera Barat, Badan Penghubung telah melaksanakan promosi potensi daerah Sumatera Barat dalam berbagai media dan kegiatan. Pada sasaran strategis ketiga Badan Penghubung yaitu Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dan Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat. Dasar penetapan target Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2021-2026 dan penyesuaian penetapan target tahun ini dengan memperhatikan Realisasi Capaian Indikator Kinerja tahun sebelumnya agar *achievable*, menantang dan realistis. Target dan Realisasi Capaian dua indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.26

Realisasi Kinerja Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2025	Kategori
		2025			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	8 kali	66.67 %	Sedang
2	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	18 kali	14 kali	77.78 %	Tinggi

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Untuk penjelasan lebih terperinci capaian indikator kinerja masing-masing sasaran Strategis “Meningkatkan Promosi dan pemberian Informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat ” dijelaskan lebih lanjut dibawah ini:

1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang memiliki budaya yang sangat beragam dan ditunjang dengan banyak destinasi wisata yang menarik serta kuliner tradisional yang sangat banyak. Kedudukan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Ibu Kota Negara salah satunya adalah mengenalkan keanekaragaman budaya dan pariwisata di Sumatera Barat. Dalam hal ini Badan Penghubung mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk dapat melaksanakan Promosi Potensi dari berbagai Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat. Untuk dasar penetapan target indikator kinerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2021-2026.

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Realisasi Kinerja Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah di Sumatera Barat Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2025	Kategori
		2025			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	8 kali	66.67 %	Sedang

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung


Untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya dan Fasilitas Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya.

Pada Tahun 2025, Badan Penghubung melaksanakan promosi potensi sebanyak 8 kali yaitu:

	Tanggal	Acara	Tempat	Foto Kegiatan
1	2 Februari 2025	Kegiatan Paket Khusus Tahun 2025 "The Uniqueness of Sawahlunto and The Launch of The West Sumatra Calendar of Events 2025"	Anjungan Sumatera Barat, TMII.	

2	18 Maret 2025	Minang Day	Area Masjid Istiqlal Jakarta.	
3	6 April 2025	Pekan Lebaran Tahun 2025	Anjungan Sumatera Barat, TMII.	
4	29 Juni 2025	Pekan Libur Sekolah Tahun 2025	Anjungan Sumatera Barat, TMII.	

5	9 Agustus 2025	Partisipasi Kegiatan Discover Nusantara Tahun 2025	Hotel Borobudur, Jakarta.	
6	15 Agustus 2025	Partisipasi Kegiatan Pesta Rakyat GWK 2025	Bali	
7	8 Oktober 2025	Rangkaian Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Barat ke-80	Anjungan Sumatera Barat TMII	

8	11 Oktober 2025	Partisipasi Pelaksanaan Kegiatan Colours of Cultures Festival (CoCF) 2025 dengan tema "Melodi Nusantara"	Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta	

Semua aktifitas Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah di Sumatera Barat diatas dilaksanakan dengan anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya.

Capaian Kinerja Indikator sasaran strategis ini:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$66.67\% = \frac{8\ kali}{12\ kali} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat pada Sasaran Strategis Ketiga Badan Penghubung hanya mencapai **66.67 %** target yang ditetapkan pada awal tahun dengan kategori "Sedang".

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2025 dengan tahun -tahun sebelumnya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021
		2025	(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)	(n-4)

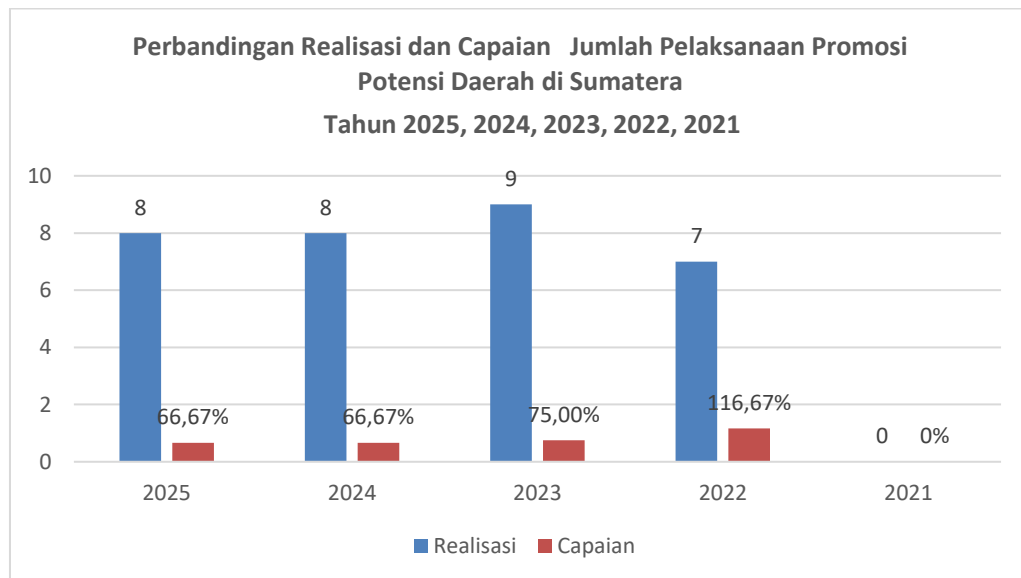
		Target	Realisasi	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	8 kali	66.67%	66,67%	75,00%	116,67%	-

Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 yang mencapai **116,67%** memang mengalami penurunan secara persentase namun dalam intensitas pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah mengalami peningkatan yaitu dari **7** (tujuh) kali pada tahun 2022 lalu menjadi **9** (Sembilan) kali pelaksanaan dalam tahun 2023. Namun untuk tahun 2024 dan 2025 masing-masing kali pelaksanaan sebanyak **8** (delapan) kali. Untuk perbandingan Capaian dengan Tahun 2021 tidak dapat dilakukan karena Indikator Kinerja tersebut baru ditetapkan pada tahun 2022.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran dengan Indikator Kinerja ini dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah:

Grafik 3.5



Sumber : Data diolah

1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	8 kali	66.67 %

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.29 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah pelaksanaan promosi potensi Daerah Sumatera Barat sampai Akhir Periode Renstra telah mencapai 66.67% target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan Capaian pelaksanaan Promosi Potensi Daerah tahun 2025 sama dengan tahun lalu, dan beberapa rencana pelaksanaan Acara Promosi Daerah seperti acara Pekan Desember 2025 tidak jadi dilaksanakan mengingat situasi kondisi bencana yang terjadi di Sumatera Barat.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat tahun 2025 terealisasi sebesar **66.67%** dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori "**Sedang**" yang berarti gradasi cukup menunjukkan pencapaian /realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal. Pada Tahun 2025 Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Potensi Daerah ini berkurang jika dibandingkan dengan tahun lalu dan dari Anggaran Murni 2025 dikarenakan alokasi anggaran untuk kegiatan lain yang lebih *urgent* sifatnya. Selain itu ada 2 Acara yang direncanakan pada akhir tahun yaitu Parade Warna Warni dan Pekan Desember yang batal dilaksanakan karena kondisi Sumatera Barat yang sedang mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Namun Badan Penghubung tetap berupaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Anjungan Sumatera Barat yang strategis dan sebagai primadona di TMII untuk tingkat kunjungan tamu negara maupun *tourist* biasa di TMII adalah peluang penyebaran

informasi daerah secara global kepada pengunjung domestik dan mancanegara. Revitalisasi Taman Mini dengan konsep baru *eco-park* sehingga Taman Mini Indonesia Indah tampil sebagai tempat wisata yang menjadi panggung seni, rekreasi, dan sarana edukasi bagi pengunjung dari berbagai rentang usia.

- b). Koordinasi yang baik antara Badan Penghubung dengan pihak pengelola Taman Mini agar dapat terus berpartisipasi dalam Agenda Promosi Rutin Taman Mini. Koordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait maupun pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah agar potensi daerah serta ciri khas Sumatera Barat, mulai dari rumah adat, pakaian adat, ikon hingga kuliner khas daerah dapat lebih terekspose ke turis domestik bahkan mancanegara sehingga memungkinkan bagi Badan Penghubung melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Promosi potensi Daerah Sumatera Barat, baik dilaksanakan di Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah maupun tempat lain di Jakarta atau Provinsi Lainnya.
- c). Koordinasi yang baik dengan Instansi/ Lembaga/ Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat serta penggiat kesenian tradisional Sumatera Barat untuk menjembatani kerjasama dalam pelaksanaan promosi potensi daerah yang dapat ditampilkan.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat didukung oleh 2 orang ASN Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata serta 1 orang ASN Penata Pameran pada Seksi Promosi Daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemberian informasi potensi Daerah Sumatera Barat di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yaitu melakukan pemberian promosi potensi

Daerah Sumatera Barat.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat dengan target 12 kali pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 8 kali dengan tingkat capaian sebesar 66.67%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan total Rp 388.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp 313.020.000,- atau sebesar 80.66%. Anggaran ini berada pada Program Pelayanan Penghubung pada 2 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya dan Sub Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini Badan Penghubung juga berupaya dalam melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien walaupun terdapat pengurangan Anggaran jika dibanding tahun lalu dan DPA Murni 2025.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 388.070.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 66.67%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 313.020.000,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp.388.070.000 \times 66.67\%) - Rp.313.020.000}{Rp 388.070.000} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -0.14 \%$$

Dari jumlah total anggaran sebesar Rp 388.070.000,- terealisasi sebesar Rp 313.020.000 atau sekitar 80.66%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 75.050.000,- atau sebesar 19.34%. Jika membandingkan antara Capaian Indikator Kinerja ini adalah **66.67%** yang lebih rendah dari realisasi Anggaran (**80.66 %**) dengan tingkat inefisiensi sebesar **-0.14%** atau sebesar **15.02%** (dalam Nilai Konversi Efisiensi) .

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian target Indikator Kinerja terjadi inefisiensi sebesar **-0.14%** dalam menggunakan Anggaran sebesar Rp 388.070.000,- yang terealisasi sebesar Rp 313.020.000 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja sebesar 66.67%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Jumlah pelaksanaan Promosi Potensi Daerah di SumateraBarat. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Jumlah Pelaksanaan Promosi Potensi daerah di Sumatera Barat

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	294.285.000	223.841.000	76.06%	70.444.000
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	93.785.000	89.179.000	95.09%	4.606.000

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Realisasi Capaian Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatkan Promosi Potensi dan penyebarluasan	12 kali	8 kali	66,67%

	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Informasi Daerah di luar Sumatera Barat			
--	---	---	--	--	--

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah Pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat mencapai target sebanyak **66.67%** yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

3. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat

Selain melaksanakan kegiatan promosi potensi daerah di Sumatera Barat, Badan Penghubung juga menyediakan wadah untuk melaksanakan Fasilitasi di bidang Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, Sanggar Seni Minang, Organisasi Masyarakat Minang di Jakarta atau di luar Sumatera Barat. Fasilitasi ini berupa penyediaan Sarana untuk promosi potensi daerah, maupun keikutsertaan dalam penampilan Seni atau Budaya Minangkabau dalam acara-acara yang dilaksanakan di Anjungan Sumatera Barat ataupun tempat lain. Untuk dasar penetapan target indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini di tahun 2025 dilaksanakan penyesuaian dari Renstra karena pada tahun 2024 Realisasi Capaian telah melebihi target Renstra yang ditetapkan. Oleh karena itu dengan memperhatikan Realisasi Capaian Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, agar target yang ditetapkan *achievable*, menantang dan realistis, maka ditetapkan target sebanyak 18 Kali dan tercapai sebanyak 14 kali pada tahun ini.

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel 3.32
Pencapaian Kinerja Indikator
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat




No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2025	Kategori
		2025			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	18 kali	14 kali	77.78 %	Tinggi

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Selain melaksanakan promosi potensi daerah di Sumatera Barat, Badan Penghubung juga melaksanakan Fasilitasi di bidang Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat di Jakarta dan di luar Sumatera Barat. Pada tahun 2025 dilaksanakan 14 (delapan belas) kali fasilitasi promosi yaitu:

No	Tanggal	Acara	Tempat	Penyelenggara	Foto Kegiatan
1	17 Maret 2025	Restorasi Syuting Siti Nurbaya di Anjungan Sumatera Barat TMII	Anjungan Sumatera Barat TMII	TVRI	
2	20 April 2025	Parade Budaya Hoyak Tabuik pada HUT TMII ke 50 Tahun	Anjungan Sumatera Barat TMII dan Kawasan TMII	Pemerintah Kota Pariaman	

3	28 April 2025	Halal bi Halal Ikatan Keluarga Perantau Payakumbuh	Anjungan Sumatera Barat TMII	Ikatan Keluarga Perantau Payakumbuh	
4	29 April 2025	Fasilitasi pada Acara coffee morning dan pemberian apresiasi dalam rangka penerimaan penghargaan skytrax terminal 3	Bandara Soekarno Hatta	PT Angkasa Pura Indonesia, Jakarta	
5	3 Mei 2025	Halal bi Halal Ikatan Keluarga Dharmasraya	Anjungan Sumatera Barat TMII	Ikatan Keluarga Dharmasraya	

6	3 Mei 2025	Fasilitasi Peringatan Hari Tari Sedunia 2025-05-03 di TMII	Plaza Kori Agung, TMII.	Taman Mini Indonesia Indah	
7	22 Juni 2025	Parade Budaya Berkain	Kota Tua Jakarta	TIC Kota Tua Jakarta	
8	26 dan 27 Juli 2025	Hari Anak Nasional	Istana Anak-Anak	Taman Mini Indonesia Indah	

9	14 September 2025	Baralek Gadang Persatuan Chaniago Badunsanak	Anjungan Sumatera Barat	Taman Mini Indonesia Indah	
10	4 Oktober 2025	Parade Batik Nasional	TMII	TMII	
11	15 Oktober 2025	Fasilitasi Pemotretan Busana Adat Nagari Minang Kabau	Anjungan Sumabar TMII	Perkumpul an Perempua n Minang Indonesia	

12	23 November 2025	Fasilitasi acara Vinfast Photo & Video Competition Mobil VF6	Anjungan Sumabar TMII	PT. Ekosistem Kreatif Indonesia (CXO Media)	
13	7 Desember 2025	Silaturahmi Keluarga Ikatan Korong Simpang Kataping Jakarta	Anjungan Sumatera Barat TMII	IKSK Jakarta	
14	10 Desember 2025	Fasilitasi Malam Seribu Doa untuk Ranah Minang	Anjungan Sumatera Barat TMII	Parantau Minang Bersatu	

Capaian Kinerja Indikator sasaran strategis ini:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$77.78\% = \frac{14 \text{ kali}}{18 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Jumlah Fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat pada Sasaran Strategis Ketiga Badan Penghubung mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan fasilitasi promosi potensi daerah tercapai sebanyak **77.78%** dengan kategori **“Tinggi”**.

1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

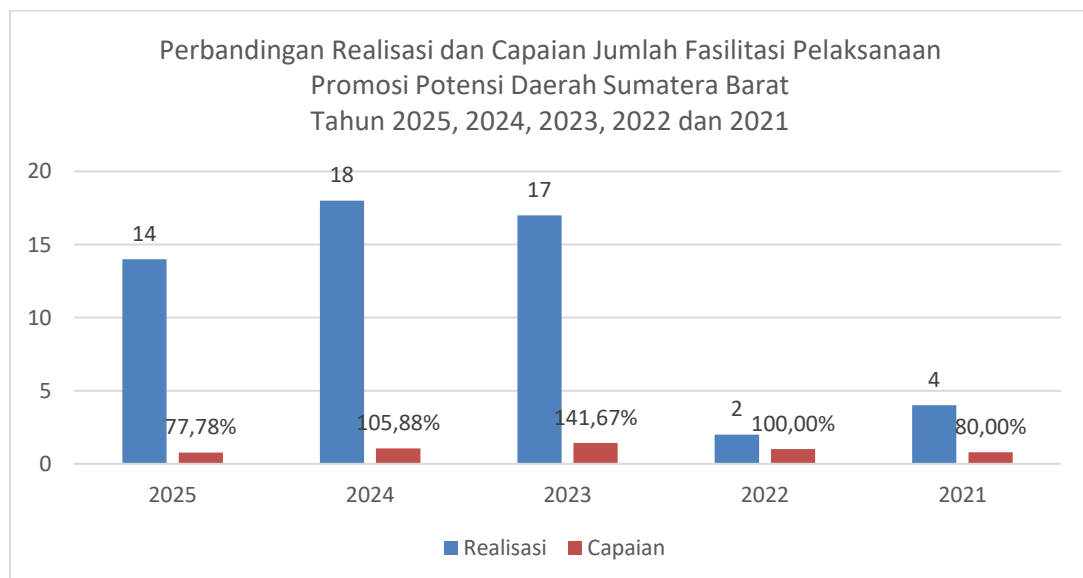
Tabel 3.33

Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2025, 2024, 2023, 2022 dan 2021

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2023 (n-1)	Capaian Tahun 2022 (n-2)	Capaian Tahun 2021 (n-2)
		2025						
		Target	Realisasi	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	18 kali	14 kali	77,78%	105,88%	141,67%	100%	80,00%

Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan Hasil Analisa
 Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 yang mencapai **105.88%**, pelaksanaan fasilitasi promosi potensi daerah Sumatera Barat mengalami penurunan baik dalam persentase dan kali pelaksanaan yaitu dari 18 (delapan belas) kali pelaksanaan di tahun 2024 menjadi 14 (delapan belas) kali realisasi pelaksanaan di tahun 2025. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran ini tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah:

Grafik 3.6



Sumber : Data Diolah

1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.34

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Promosi Potensi yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/ RPJMD	REALISASI TAHUN 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	14 kali	116.67 %

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.34 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi Daerah Sumatera Barat sampai Akhir Periode Renstra telah mencapai 116.67% target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan fasilitas promosi tahun 2025 lebih banyak terlaksana.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah fasilitas promosi potensi daerah Sumatera Barat tahun 2025 terealisasi sebesar 77.78% dari target yang ditetapkan tahun 2025 dengan kategori Tinggi, walaupun terkendala keterbatasan ketersediaan Anggaran pada DPA Badan Penghubung serta Kebijakan Efisiensi untuk fasilitas pelaksanaan Acara/Kegiatan Promosi Potensi Daerah dengan Skala Besar, namun Badan Penghubung terus melaksanakan koordinasi yang baik dengan Instansi/ Lembaga/ Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat serta penggiat budaya atau kesenian tradisional Sumatera Barat untuk menjembatani kerjasama dalam fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah yang dapat ditampilkan dan melaksanakan kegiatan tersebut pada Tahun 2025. Pelaksanaan fasilitas promosi potensi daerah Sumatera Barat mengalami peningkatan dalam persentase dan dalam kali pelaksanaan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- a). Lokasi Anjungan Sumatera Barat yang strategis dan salah satu Anjungan favorit di Taman Mini Indonesia Indah untuk tempat kunjungan tamu negara maupun turis domestik adalah peluang penyebaran informasi daerah secara global. Membaiknya situasi ekonomi dan pariwisata dan telah selesainya Revitalisasi Taman Mini sehingga memungkinkan bagi Badan Penghubung melaksanakan kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Promosi potensi Daerah Sumatera Barat di Anjungan Sumatera Barat .

- b). Koordinasi yang baik dengan Instansi/ Lembaga/ Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat serta penggiat kesenian tradisional Sumatera Barat untuk menjembatani kerjasama dalam pelaksanaan promosi potensi daerah yang dapat ditampilkan.
- c). Banyaknya permintaan kerjasama promosi dari berbagai pihak baik swasta, organisasi/ lembaga pemerintahan maupun non pemerintah, organisasi masyarakat serta penawaran fasilitasi promosi daerah dari berbagai sanggar seni, kelompok masyarakat yang peduli seni budaya daerah, baik dilaksanakan di Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah maupun tempat lain di Jakarta atau Provinsi Lainnya.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat didukung oleh 2 orang ASN Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata serta 1 orang ASN Penata Pameran pada Seksi Promosi Daerah yang bertugas untuk melaksanakan fasilitasi promosi potensi Daerah Sumatera Barat di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yaitu melaksanakan fasilitasi pelaksanaan promosi potensi Daerah Sumatera Barat.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target 18 kali pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 14 kali dengan tingkat capaian sebesar 77.78%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 388.070.000,-

dengan realisasi sebesar Rp 313.020.000,- atau sebesar 80.66%. Anggaran ini berada pada Program Pelayanan Penghubung pada 2 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya dan Sub Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 388.070.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 77.78% (Maksimal Capaian Kinerja 120%)

RA = Realisasi Anggaran = Rp 313.020.000,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.}388.070.000 \times 77.78\%) - \text{Rp.}313.020.000}{\text{Rp.}388.070.000} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = - 0.03\%$$

Dari jumlah total anggaran sebesar Rp 388.070.000, terealisasi sebesar Rp 313.020.000 atau sekitar **80.66%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 75.050.000 atau sekitar 19.34%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan tahun 2025 adalah **77.78%**, lebih rendah dari realisasi anggaran sebesar **80.66%** dengan tingkat efisiensi sebesar **-0.03%** atau sebesar **42.79%** (dalam nilai konversi efisiensi). Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung dalam pencapaian target Indikator terjadi inefisiensi sebesar -0.03% atau senilai 42.79% dalam nilai konversi efisiensi dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 388.070.000 yang terealisasi sebesar Rp 313.020.000 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dengan capaian 77.78%.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Promosi Potensi daerah di Sumatera Barat**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	294.285.000	223.841.000	76.06%	70.444.000
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	93.785.000	89.179.000	95.09%	4.606.000

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36

Realisasi Capaian Kinerja fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah	18 kali	14 kali	77.78%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah fasilitas Pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat tercapai melebihi target sebanyak 77.78% yang didukung oleh anggaran, personel serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

II. Tujuan:
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Tujuan ini dicapai dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**
2. **Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi**

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

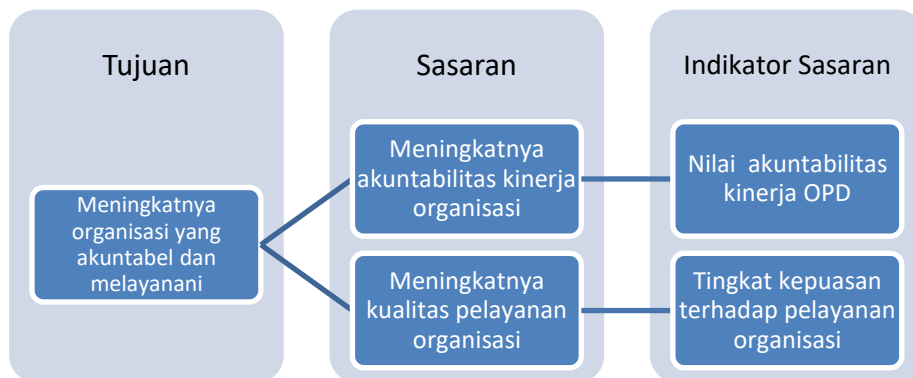
Tabel 3.37
Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73,53)	BB (70,05)	95,27%
Rata-Rata Capaian Sasaran 4					95,27%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (79,00%)	Baik (87,25%)	110,44%
Rata-Rata Capaian Sasaran 5					110,44%
Rata-Rata Capaian Indikator					102,86%

Sumber : Hasil Laporan Evaluasi Inspektorat dan Survey melalui kuesioner

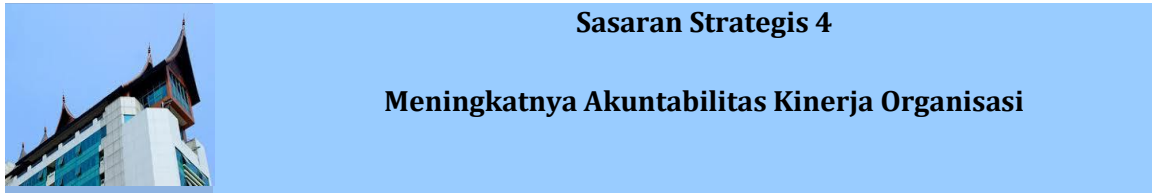
Dari tabel 3.37 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indikator tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani adalah sebesar 102.86%.

Tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dicapai melalui 2 (dua) sasaran strategis yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2 : Tujuan II dan Sasaran Strategis

Tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani adalah hasil kerja dari organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya baik SDM maupun Anggaran keuangan serta pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.



Sesuai dengan Sasaran Strategis keempat Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yaitu yang diukur dengan Nilai SAKIP atau nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan indikator/tolok ukur bagaimana tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang tercermin dari bagaimana Pemerintah Daerah tersebut mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP ini diperoleh dari penilaian terhadap 5 komponen SAKIP yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (30%),
2. Pengukuran Kinerja (30%),
3. Pelaporan Kinerja (15%),
4. Evaluasi internal (25%).

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD merupakan nilai hasil evaluasi penerapan SAKIP di OPD yang evaluasinya dilakukan oleh Inspektorat Daerah setiap tahun. Range nilai evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.38

Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Kategori	Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan

			efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
2	A	>80-90	<p>Memuaskan</p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unitkerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.</p>
3	BB	>70-80	<p>Sangat Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi,sertapengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</p>
4	B	>60-70	<p>Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerj utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unitkerja.</p>
5	CC	>50-60	<p>Cukup (Memadai)</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
6	C	>30-50	<p>Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
7	D	0-30	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum</p>

			terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
--	--	--	---

Untuk dasar penetapan target Indikator Kinerja pada Sasaran ini pada tahun 2025 dilaksanakan penyesuaian dari Renstra karena pada tahun 2024 realisasi capaian telah melebihi target Renstra yang ditetapkan. Oleh karena itu dengan memperhatikan Realisasi Capaian Indikator Kinerja tahun sebelumnya, agar *achievable* menantang dan realistis, maka ditetapkan target nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2025 **73.53 (BB)** dengan capaian nilai **70.05 (BB)**.

1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Nilai akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai akuntabilitas kinerja OPD. Indikator sasaran, target dan realisasi tahun ini dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.39
Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2025 %
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	BB (73.53)	BB (70.05)	Sangat Tinggi 95,27%

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mendapat nilai **70.05** dengan kategori BB (interpretasi **SANGAT BAIK**), artinya terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung dan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi

informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kinerja dengan bobot 30% dinilai **23.51%**
- 2) Pengukuran kinerja dengan bobot 25% dinilai **19.73%**
- 3) Pelaporan kinerja dengan bobot 15% dinilai **11,14%**
- 4) Evaluasi internal dengan bobot 25% dinilai **15.67%**

Prediket evaluasi SAKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/100/INSP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700/156/LHE/INSP/2025.

Pengukuran tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$95.27\% = \frac{70.05}{73.53} \times 100\%$$

Dari tabel 3.39 dapat dilihat target indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 adalah BB (73.53), sedangkan realisasinya adalah BB (70.05) maka tingkat capaiannya **95.27%**. Dengan demikian, capaian indikator kinerja Badan Penghubung tahun 2025 termasuk kategori kinerja “**Sangat Tinggi**”.

1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun- tahun sebelumnya

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.40

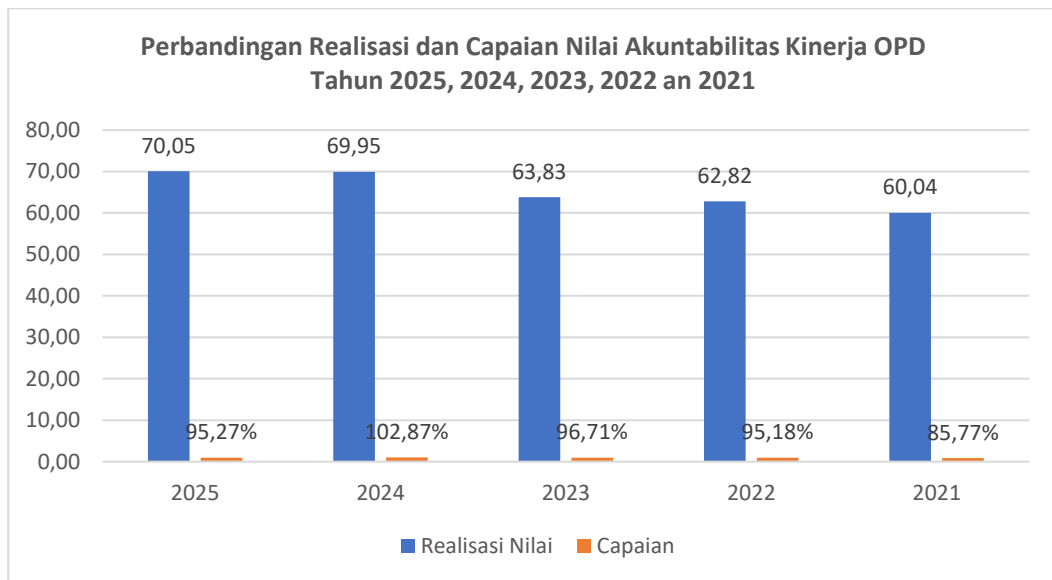
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025, 2024, 2023, 2022 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2025	Capaian 2024	Capaian 2023 (n-1)	Capaian 2022 (n-2)	Capaian 2021 (n-3)
					%	%	%	%	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	BB (73.53)	BB (70.05)	95,27%	BB (69.95) 102.87%	B (63,83) (96.71)	B (62.82) (95.18)	B (60,04) (85.77)

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari Tabel 3.40 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu BB dengan nilai 70.05 dan secara capaian persentase juga mengalami peningkatan dibanding Capaian Tahun awal Renstra di tahun 2021. Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran indikator kinerja ini Tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.7



Sumber : Data Diolah

1.3. Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.41

Perbandingan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sampai Akhir Periode RPJMD Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (70.00)	BB (70.05)	100.07 %

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Tabel 3.41 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Nilai akuntabilitas kinerja” pada tahun 2025 telah melewati target akhir Renstra yaitu mencapai 70.05 dengan capaian sebesar 100.07%. Capaian kinerja ini akan menjadi perhatian Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sehingga kedepannya dapat lebih meningkatkan tingkat kemajuan hasil capaian.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Badan Penghubung sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 terealisasi sebesar 95.27 % dari target yang ditetapkan tahun 2025 dengan kategori Sangat Tinggi dan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, pada tahun 2024 Badan Penghubung mengalami peningkatan dalam nilai evaluasi SAKIP secara keseluruhan. Usaha perbaikan yang telah dilakukan Badan Penghubung antara lain:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari level Kepala Badan sampai dengan Staf termasuk target kerjanya secara proporsional melalui proses cascading kinerja;
- Penetapan Target Kinerja yang *achievable*, menantang dan realistis yang disesuaikan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- Melakukan pengentryan dokumen perencanaan Badan Penghubung ke website <https://sakip.sumbarprov.go.id/>. E-SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Website ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan;
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun lalu yang dikeluarkan oleh Inspektorat dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap Sistem AKIP

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 40 ASN Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural dan sedikit pada level Pelaksana/Staf atau mencapai 60 % dari total ASN pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing bidang untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terealisasi pada tahun 2025 sebesar 70.05 dari target 73.53 dengan tingkat capaian sebesar 95.27%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 334.646.000- dan telah terealisasi sebesar Rp 247.486.400,- atau sebesar 73.95%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) kegiatan dengan 5 sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 3) Evaluasi Perangkat Kinerja Daerah.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan yaitu 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; dan 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 334.646.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 95.27% (Maksimal Capaian Kinerja 120%)

RA = Realisasi Anggaran = Rp 247.486.400,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.}334.646.000 \times 95.27\%) - \text{Rp.}247.486.400}{\text{Rp.}334.646.000} \times 100 \%$$

Tingkat Efisiensi = **0.21%**

Dari jumlah total anggaran sebesar Rp 334.646.000,- terealisasi sebesar Rp 247.486.400,- atau sekitar 73.95% dengan sisa anggaran sebesar Rp 247.486.400,- atau sebesar 26.05%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah **95.27%** lebih tinggi dari Realisasi anggaran sebesar **73.95%** dengan tingkat efisiensi sebesar **0.21%** atau sebesar **103.29%** dalam Nilai Efisiensi Konversi dibulatkan menjadi **100%** (dalam Nilai Konversi Efisiensi). Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD :

Tabel 3.42
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.162.000	4.465.100	54,71%	3.696.900
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	11.520.000	1.214.000	10,54%	10.306.000
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.298.000	17.929.900	33,64%	35.368.100
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat</i>					
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	203.280.000	198.970.000	97,88%	35.368.100
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	58.386.000	24.907.000	42,66%	33.479.000
		334.646.000	247.486.000		118.218.100	

Dari tabel 3.42 dapat dilihat bahwa efisiensi telah dilakukan dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebesar Rp. 334.646.000,- atau sebesar 26.05%.

Selain anggaran, efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah dengan menetapkan anggaran dan merealisasikan belanja pegawai dan belanja barang jasa seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas yang ada serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya.


Pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari dukungan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan melalui anggaran APBD. Secara keseluruhannya pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.43
Realisasi Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	11 orang	11 orang	100%
			Jumlah Kegiatan penunjang pelaksanaan Tugas AS N	12 kali	12 kali	100%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi tercapai sesuai target diatas 90% yang didukung oleh anggaran, personel serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2025 Badan Penghubung telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

- Reviu dan perbaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung dan hasil pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun lalu yang dikeluarkan oleh Inspektorat dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan menyusun matriks tindak lanjut;
- Monitoring berkala atas pencapaian Rencana Aksi yang disusun awal tahun.



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Sasaran Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2021-2026 kelima yaitu meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi yang diukur dengan tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh organisasi. Pelayanan yang dimaksud disini merupakan pelayanan yang diberikan kepada ASN/Masyarakat/Organisasi yang menjadi *stakeholder* dari OPD yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran adalah:

Tabel 3.44

Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

METODE PENGHITUNGAN :

Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4

Pilihan A bernilai 4

Pilihan B bernilai 3

Pilihan C bernilai 2

Pilihan D bernilai 1

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepadapengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat penggunalayanan. Survei ini dilakukan dengan kuesioner dan hasil analisa survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Tahun 2025 dilaksanakan survey kepuasan pada triwulan empat dengan menggunakan Aplikasi SEPAKAT <https://sepakat.sumbarprov.go.id/> pada beberapa responden *stakeholders* Badan Penghubung yang terdiri dari Ajudan/Protokoler Pimpinan Daerah yang diberikan Pelayanan, Organisasi Masyarakat Perantau Minang, Mahasiswa Asrama yang dibina, OPD/ASN yang difasilitasi pengurusan kepentingannya serta para pengunjung Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini. Total pertanyaan pada kuesioner sebanyak 11 pertanyaan pilihan berganda dengan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Total kuesioner yang dikumpulkan sebanyak **59 responden** dengan hasil pengolahan sebagai berikut:

Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai pengolahan Aplikasi Sepakat:

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$IKM = 3.49$$

Konversi IKM = 87.25 dengan Nilai Layanan B: Baik

Dari penghitungan pengolahan kuesioner yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan Nilai **87.25%** maka pelayanan Badan Penghubung terhadap *stakeholdersnya* tergolong Mutu Pelayanan **B** dengan Kinerja Unit Pelayanan **BAIK**.

Pengukuran tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$110.44\% = \frac{87.25}{79.00} \times 100\%$$

Pencapaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.45
Pencapaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan
Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	79.00 (Baik)	87.25 (Baik)	110.44%

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja **“Sangat Tinggi”**.

2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.46

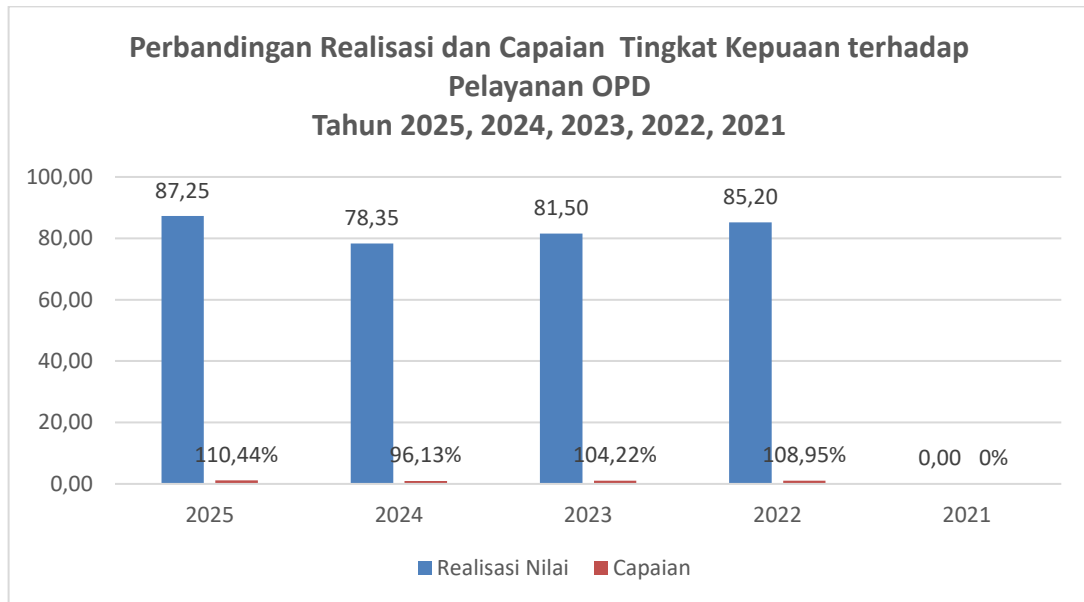
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan OPD Tahun 2025, 2024, 2023, 2022 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2025	Capaian 2024	Capaian 2023	Capaian 2022	Capaian 2021
					%	(n-1)	(n-2)	(n-3)	(n-4)
1	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan OPD	Nilai	Baik (79,00)	Baik (87,25)	110,44%	Baik (78,35) 96.13%	Baik (81,50) 104,22%	Baik (85,20) 108,95%	- -

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya memang mengalami peningkatan, baik dalam hal Nilai IKM maupun persentase capaian, namun jika dilihat dari jumlah responden yang diukur penilaiannya maka tahun 2025 ini mengalami penurunan dari 110 responden menjadi 59 responden atau sekitar 46.36%. Penurunan jumlah responden ini dikarenakan jangka waktu survey melalui aplikasi yang singkat. Hasil Survey melalui Aplikasi Sepakat ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam mendapatkan penilaian yang lebih menyeluruh atas kinerja pelayanan yang diberikan Badan Penghubung. Namun tentu saja Badan Penghubung akan melakukan evaluasi dan terus berusaha meningkatkan nilai dan kualitas pelayanan terhadap semua *Stakeholders* agar capaian Tingkat kepuasan terhadap pelayanan OPD pada tahun mendatang akan meningkat. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran ini dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah :

Grafik 3.8



Sumber : Data Diolah

2.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan OPD dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.47

Perbandingan Capaian Indikator Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan OPD sampai Akhir Periode RPJMD Renstra Badan Penghubung 2021-2026

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	Baik (80.00)	Baik (87.25)	109.06%

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Tabel 3.47 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” pada tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra yaitu 109.06%. Capaian kinerja ini tentu akan menjadi pemicu bagi Badan Penghubung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* yang dilayaninya.

2.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Badan Penghubung sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

2.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Internal Organisasi tahun 2025 terealisasi sebesar 110.44% dari target yang ditetapkan tahun 2025 dengan kategori **Sangat Tinggi**. Usaha perbaikan yang telah dilakukan Badan Penghubung antara lain:

Usaha perbaikan dalam peningkatan pelayanan publik atau *stakeholders* yang telah dilakukan Badan Penghubung antara lain:

- Penambahan tenaga pelayanan pimpinan daerah baik itu tenaga protokol ataupun supir pimpinan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan pimpinan daerah melalui mekanisme sewa kendaraan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung;
- Terus melakukan koordinasi dan *Sharing* Informasi ke Biro Administrasi Pimpinan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi lainnya terkait pelayanan pimpinan dan pengurusan kepentingan daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan organisasi/paguyuban masyarakat rantau Sumatera Barat, baik di Jakarta maupun luar Provinsi Sumatera Barat;
- Melaksanakan upaya penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung pada Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta serta Anjungan Sumatera Barat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2025 Badan Penghubung akan melakukan beberapa hal, diantaranya:

- Pelaksanaan pelatihan keprotokolan bagi protokol sehingga dapat meningkatkan kapabilitas personel pelayanan pimpinan daerah;
- Mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan paguyuban atau organisasi masyarakat rantau terkait fasilitasi permasalahan perantau Minang;
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.
- Melaksanakan pemeliharaan terhadap Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogya.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Saat ini di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat terdapat 40 orang ASN serta 35 orang tenaga *outsourcing* protokol ataupun supir pimpinan, tenaga pelayanan informasi promosi daerah, tenaga kebersihan dan keamanan yang tersebar di Anjungan Sumatera Barat serta Asrama Mahasiswa Minang Bogor dalam rangka peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Penghubung kepada *stakeholdersnya*.

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Selain itu telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan pejabat dan pimpinan daerah melalui mekanisme sewa kendaraan operasional. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi yang terealisasi pada tahun 2025 sebesar 87.25 (Mutu Layanan B/Baik) dari target 79.00% dengan tingkatcapaian sebesar 110.44%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pelayanan Penghubung sebesar Rp 14.292.821.705,- dan telah terealisasi sebesar Rp 12.168.124.168,- atau sebesar 85.13%. Anggaran ini tersebar pada 7 kegiatan dengan 22 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 14.292.821.705,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 110.44 % Realisasi

Anggaran = 13.130.139.903,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.14.292.821.705} \times 110.44\%) - \text{Rp.13.130.139.903}}{\text{Rp 14.292.821.705}} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.15.784.992.291}) - \text{Rp.13.130.139.903}}{\text{Rp 14.292.821.705}} \times 100 \%$$

Tingkat Efisiensi = **0.19%**

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar **0.19%** atau sebesar **96.44%** (dalam Nilai Konversi Efisiensi) dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 14.292.821.705,- yang terealisasi sebesar Rp 13.130.139.903,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 110.44%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut:

Tabel 3.48

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa	
Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.000.805.769	6.672.146.742	95,31%	328.659.027
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	170.600.000	112.472.196	65,93%	58.127.804
	-	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8.472.000	2.840.000	33,52%	5.632.000
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.360.000	4.570.600	85,27%	789.400
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.568.000	10.027.591	79,79%	2.540.409
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.503.300	20.118.750	98,12%	384.550
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.752.740	94.739.346	72,46%	36.013.394
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.202.400	18.220.250	32,42%	37.982.150
	-	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.332.000	46.362.004	92,11%	3.969.996
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.057.316.619	975.147.046	92,23%	82.169.573
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.319.300	-	0,00%	254.319.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.620.000	7.780.944	66,96%	3.839.056
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	382.149.600	305.872.318	80,04%	76.277.282
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.369.378.667	2.340.080.428	98,76%	29.298.239
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	529.687.310	486.368.160	91,82%	43.319.150
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.190.000	74.583.663	96,62%	2.606.337
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	749.564.000	744.337.098	99,30%	5.226.902

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.48 dapat dilihat bahwa efisiensi yang telah dilakukan dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebesar Rp. 1.162.681.802 atau sebesar 8.13% Sisa dominan berasal dari Sisa anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Pengadaan Kendaraan Listrik yang tidak bisa terlaksana karena kesalahan kode rekening di Penganggaran.

Selain anggaran, efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah dengan merealisasikan belanja pengadaan dan pemeliharaan barang sesuai dengan tagihan, pembayaran belanja rutin bulanan seperti tagihan listrik, air dan telepon sesuai dengan tagihan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya.

Pencapaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tidak terlepas dari dukungan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan melalui anggaran APBD. Secara keseluruhannya pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.49
Realisasi Capaian Kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29 unit	29 unit	100%
	-		- Jumlah Pembayaran PBB Barang Milik Daerah SKPD	3 unit	3 unit	100%
	-	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	5 orang	71,43%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	10 jenis	100%
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 jenis	20 jenis	100%
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 jenis	50 jenis	100%
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 jenis	21 jenis	100%
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- jumlah tamu yang dilayani	250 orang	250 orang	100%
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 laporan	85 laporan	106%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan yang diadakan	19 unit	19 unit	100%
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	100%
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah materai yang disediakan	1000 buah	1000 buah	100%
			- Jumlah paket yang dikirim	200 kg	230 kg	115%
			- Jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar	200 surat	150 surat	75%
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan air, listrik, telepon, internet yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100%
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- jumlah tenaga outsourcing yang tersedia	33 orang	33 orang	100%
			- Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	41 unit	100%
	-	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	4 unit	20%
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	30 unit	67%
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12 unit	100%
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	- jumlah mess yang disewa	2 unit	2 unit	100%	
		- Jumlah rumah jabatan yang disewa	1 unit	1 unit	100%	

3.4 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 3.50
Tabel Anggaran Perubahan Badan Penghubung Tahun 2025

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 2.908.443.460,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.221.467.705,-

Pada Tahun 2025 Capaian Realisasi Fisik kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung mencapai **95.25%** sementara realisasi keuangan mencapai **91.08%** Rendahnya persentase Realisasi Keuangan dibandingkan realisasi fisik terutama disebabkan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana di tahun 2025 yang tidak dapat dilaksanakan pencairan belanjanya sampai pada akhir tahun 2025 karena berbagai alasan, antara lain kondisi Bencana Alam yang melanda Sumatera Barat, serta beberapa alasan lainnya.

Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan pada Badan Penghubung Tahun 2025:

Tabel 3.51
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah;	1. Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100,00%	Program Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jasa Pelayanan pimpinan dan tamu	100%	100%	877.382.000	600.986.294	68.50%
			2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100,00%	Program Pelayanan Penghubung	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jasa Pelayanan	100%	100%	236.991.460	226.153.850	95.43%

Laporan Kinerja Badan Penghubung 2025

	2	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan	1. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	22 kali	19 kali	86.36%	Program Pelayanan Penghubung	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jasa Pelayanan	22 kali	19 kali	236.991.460	226.153.850	95.43%
			2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	2 kali	50%	Program Pelayanan Penghubung	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jasa Pelayanan	4 kali	2 kali	236.991.460	226.153.850	95.43%
	3	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah di luar provinsi Sumatera Barat.	1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	8 kali	66,67%	Program Pelayanan Penghubung	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 kali	8 kali	294.285.000	223.841.000	76.06%
			2. Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat	18 kali	14 kali	77.78%	Program Pelayanan Penghubung	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatnya Promosi dan Penyebaran Informasi Daerah diluar Sumatera Barat	18 kali	14 kali	93.785.000	89.179.000	95.09%
IV	4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73.53 (BB)	70.05 (BB)	95,27%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

Laporan Kinerja Badan Penghubung 2025

							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berupa RENJA dan terlaksananya Forum OPD	8 dokumen , 1 kali	8 dokum en, 1 kali	8.162.000	4.465.100	54.71 %
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 laporan	18 laporan	11.520.000	1.214.400	10.54 %
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	53.298.000	17.929.000	33.64%
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	203.280.000	198.970.000	97.88%

Laporan Kinerja Badan Penghubung 2025

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	Rp 58.386.000	Rp 24.907.000	42.66%
V	5	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	79.00 (Baik)	87.25 (Baik)	110.44%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 kali	2 kali	12.568.000	Rp 10.027.591	79.79%
							Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat yang ditingkatkan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.406.000.000	Rp 1.387.3660.000	98.67%
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	7.000.805.769	6.672.146.742	95.31%
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	20.503.300	20.118.750	98.12%

Laporan Kinerja Badan Penghubung 2025

								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	Rp 130.752.740	94.739.346	72.46%
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Rp 56.202.400	18.220.250	32.42%
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Rp 50.332.000	46.362.004	92.11%
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83 Laporan	83 Laporan	Rp 1.057.316.619	975.147.046	92.23%
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	0 unit	Rp 254.319.300	-	0,00%
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Rp 11.620.000	Rp 7.780.944	66.96%
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	Rp 382.149.600	305.872.318	80.04%
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Rp2.369.378.667	2.340.080.428	98.76%

Laporan Kinerja Badan Penghubung **2025**

							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah/ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	Rp 170.600.000	112.472.196	65.93%
								Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	Rp 8.472.000	2.840.000	33.52%
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Rp 5.360.000	4.570.600	85,27%
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 Unit	19 Unit	Rp 529.687.310	486.368.160	91.82%
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	62 unit	62 unit	Rp 77.190.000	74.583.663	96.62%
								Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	Rp 749.564.000	Rp 744.337.098	99.30%

Pada tahun 2025 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang mempedomani tujuan dan sasaran serta visi dan misi Pemerintah Daerah yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi RPJMD serta tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan masing-masing Analisa Capaian Sasaran tersebut diatas, disimpulkan bahwa dari 5 (lima) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan telah mencapai kategori "**Sangat Tinggi**", 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai kategori "**Tinggi**", satu indikator kinerja yang mencapai kategori "**Sedang**" dan 1 (satu) kategori dengan kategori "**Sangat Rendah**". Secara rata-rata Capaian Sasaran Strategis Badan Penghubung pada tahun 2025 yaitu **89.22%** dengan kategori "**Tinggi**".

Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menggunakan informasi pada Laporan ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan serta penetapan target kinerja yang *achievable*, realistis dan menantang;
- c. Peningkatan kapabilitas ASN Badan Penghubung melalui kegiatan bimbingan teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan pelatihan keprotokolanan bagi protokol dan sopir sehingga dapat meningkatkan kapabilitas personel pelayanan pimpinan daerah;
- d. Koordinasi yang baik dengan Kementrian dan Lembaga di Pemerintah Pusat dalam hal pengurusan kepentingan daerah dan Surat Keputusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat.
- e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
- f. Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah, Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta serta memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien;

- g. Menguatkan komitmen dari semua ASN dan pegawai Badan Penghubung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima sebagai Duta Sumatera Barat di Jakarta.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.


Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program/Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis SKPD Badan Penghubung Tahun 2021 – 2026 dengan capaian kinerja memuaskan. Masih terdapat upaya-upaya perbaikan kinerja yang harus dilaksanakan pimpinan dan staf Badan Penghubung untuk mewujudkan kinerja yang lebih akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dibuat. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2026

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT


ASCHARI CAHYADI TAMA, S.STP, M.Soc.Sc.Ph.D
Pembina Tk.I /NIP. 19800904 199810 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENGHUBUNG

Jl. Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur 13140, Tlp. 021 - 85909008, Fax. 021 - 8580889
Website : <http://www.penghubung.sumbarprov.go.id>, Email : penghubung@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP,M.Soc.Sc.Ph.D**

Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGHUBUNG,

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP.M.Soc.Sc.Ph.D
Pembina Tk.I /NIP. 19800904 199810 1 002

PERJANJIAN KINERJA

**SKPD : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani. 2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100% 100 %
2.	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	1. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan 2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	22 kali 4 kali
3.	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat 2. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali 18 kali
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73.53 (BB)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	79.00 (Baik)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 3.704.399.870,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.502.531.398,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 18.306.931.268,-	

Jakarta, Januari 2025

**PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**


MAHYELDI

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGHUBUNG,**


ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP.M.Soc.Sc.Ph.D
Pembina Tk.I /NIP. 19800904 199810 1 002